

BAB 4

ANALISIS DAN ARAHAN INVESTASI PROGRESIF DI JAWA TENGAH

4.1 Analisis Investasi Jawa Tengah

Analisis ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. ICOR merupakan rasio antara jumlah investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan *output* (PDRB). Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien investasi yang dilakukan karena dibutuhkan investasi lebih sedikit untuk menghasilkan pertumbuhan *output* yang sama. Secara umum, nilai ICOR berdasarkan BPS Kajian ICOR Jawa Tengah menerangkan bahwa ICOR berfungsi sebagai indikator seberapa efisien investasi yang dilakukan dalam mendorong pertumbuhan *output*. Semakin kecil angka koefisien ICOR, semakin efisien pula investasi tersebut dalam menghasilkan tambahan output. Sebaliknya, apabila koefisien ICOR bernilai negatif atau justru terlalu besar, hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi dalam pemanfaatan investasi. Batas ambang nilai ICOR yaitu di bawah 4 dikategorikan efisien, 4 - 6 cukup efisien, dan di atas 6 tidak efisien. Menurut Sullivan 2007 yang tertuang dalam kajian BPS menerangkan efisiensi dalam teori ekonomi menerangkan sejumlah konsep yang berkaitan terhadap penggunaan, pemaksimalan, dan pemanfaatan sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Sehingga keuntungan bersih dari semua kegiatan ekonomi yang ada dinilai maksimal, maka alokasi sumber daya dikatakan efisien.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.1.1 Nilai ICOR Jawa Tengah 2015-2024

Gambar 4.16 menggambarkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi melalui ICOR Jawa tengah selama 2015-2024. Tahun 2019 merupakan kondisi khusus dimana terjadi guncangan dikarenakan pandemi Covid-19 mencapai nilai -2,21. Guncangan tersebut berpengaruh pada nilai PDRB dan investasi dimana nilai negatif dapat terjadi karena nilai *output* pada nilai investasi dan PDRB tahun 2020 lebih kecil dibandingkan pada tahun 2019 sehingga, selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada Tahun 2015 hingga 2018 mengalami peningkatan dari 0,62 hingga 1,16 dengan nilai yang relatif ideal. Tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 1,57 dan kembali menurun pada tahun 2021 dengan nilai 1 yang kemudian mengalami fluktuasi hingga tahun 2024 dengan nilai 1,12.

Koefisien ICOR ini dihitung berdasarkan nilai investasi dan output yang dinilai dalam harga konstan agar pengaruh fluktuasi harga dapat dihilangkan (atas dasar harga konstan 2010). Koefisien nilai ICOR pada tahun 2020 sebesar 1,57 memberikan informasi bahwa untuk meningkatkan 1 unit output dibutuhkan penambahan terhadap modal atau nilai investasi sebanyak 1,57 unit. Peningkatan ini terjadi pada kurun waktu yang sama. Angka tersebut memiliki arti dalam peningkatan PDRB sebesar 1 M dibutuhkan investasi sebesar 1,57M. Nilai dari PDRB menggunakan harga konstan agar fluktuasi dari harga dalam ICOR dapat dihilangkan.

Berdasarkan nilai ICOR yang ada didapatkan nilai investasi per sektor dalam mendukung nilai investasi sebagai berikut.



Sumber: Badaan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia

Gambar 4.1.2 Nilai Investasi Per-Sektor di Jawa Tengah 2020-2024

Investasi yang dominan dalam kurun waktu 5 tahun terlihat pada 5 sektor tertinggi yaitu Industri Pengolahan dengan rerata nilai investasi mencapai 27.186,02 miliar, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai investasi mencapai 12.327,5 miliar, Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai investasi mencapai 96.250,2 miliar, Transportasi dan Pergudangan nilai investasi mencapai 5.863.9 miliar dan juga Real Estat dengan nilai investasi mencapai 4.869,6 miliar.

4.2 Analisis Sektor Basis dan Non-Basis

Konsentrasi relatif wilayah pada sektor ekonomi diidentifikasi menggunakan data PDRB konstan tahun 2010, selama 10 tahun terakhir (2015-2024). Analisis ini menggunakan LQ dari sektor PDRB konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis LQ terhadap sektor lapangan usaha yang dibandingkan dengan sektor lapangan usaha di Jawa Tengah merupakan identifikasi perbandingan yang relatif pada sektor lapangan usaha di setiap provinsi terhadap sektor lapangan usaha yang sama di provinsi lainnya. Sektor yang terkategori basis berdasarkan nilai PDRB merupakan sektor lapangan usaha yang lebih tinggi hasil produksinya dibandingkan sektor lapangan usaha lain di provinsi lainnya dan provinsi memiliki kemampuan dalam melakukan ekspor pada sektor berdasarkan lapangan

usaha tersebut. Artinya, sektor basis tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan internal wilayah itu sendiri, tetapi juga menghasilkan surplus yang dapat dipasarkan ke luar wilayah, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah (*economic base*).

Sektor yang secara konsisten memiliki nilai *Location Quotient* (LQ) lebih besar dari 1 ($LQ > 1$) pada setiap tahun dalam periode pengamatan mengindikasikan bahwa kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB di wilayah kajian secara konsisten lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Nilai $LQ > 1$ ini menjadi dasar penetapan suatu sektor sebagai sektor basis, yang berarti sektor tersebut memiliki spesialisasi dan keunggulan relatif di wilayah kajian. Semakin tinggi nilai LQ suatu sektor, semakin besar keunggulan wilayah tersebut pada sektor yang dimaksud, serta semakin kuat potensi ekspor yang dimiliki wilayah ke wilayah lain.

Sektor dengan nilai LQ kurang dari 1 ($LQ < 1$) menunjukkan bahwa sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan dikategorikan sebagai sektor non-basis, sehingga wilayah masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan sektor. Sementara itu, nilai LQ sama dengan 1 ($LQ = 1$) mengindikasikan bahwa kontribusi sektor di wilayah kajian setara dengan kontribusi sektor yang sama di tingkat provinsi, sehingga tidak terdapat keunggulan maupun ketertinggalan yang signifikan.

Tabel 4.1 Nilai Basis Jawa Tengah

Berdasarkan nilai LQ di atas maka dapat disimpulkan sektor basis di Jawa Tengah sebagai berikut.

No.	SEKTOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,542	1,526	1,509	1,503	1,475	1,044	1,036	1,083	1,082	1,101	1,290
2	Pertambangan dan Penggalian	0,337	0,397	0,418	0,423	0,434	0,309	0,311	0,290	0,279	0,277	0,348
3	Industri Pengolahan	2,332	2,332	2,353	2,374	2,414	1,681	1,670	1,718	1,726	1,728	2,033
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,509	0,493	0,501	0,523	0,518	0,116	0,117	0,118	0,121	0,125	0,314
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,859	1,884	1,908	1,921	1,904	0,849	0,860	0,874	0,874	0,877	1,381
6	Konstruksi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,008	0,007	0,008	0,008	0,008	1,147	1,163	1,195	1,205	1,208	0,596
8	Transportasi dan Pergudangan	1,090	1,057	1,044	1,019	1,012	0,683	0,686	1,029	0,983	0,964	0,957
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,058	0,059	0,061	0,064	0,062	1,174	1,201	0,083	0,085	0,085	0,293
10	Informasi dan Komunikasi	0,141	0,136	0,131	0,130	0,124	1,028	1,024	1,012	1,049	1,079	0,585

No.	SEKTOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,974	0,954	0,973	1,024	1,060	0,676	0,679	0,695	0,683	0,673	0,839
12	Real Estat	0,267	0,280	0,297	0,316	0,332	0,659	0,657	0,705	0,749	0,782	0,505
13	Jasa Perusahaan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,758	0,786	0,827	0,824	0,833	0,771	0,771	0,825	0,820	0,836	0,805
15	Jasa Pendidikan	0,154	0,164	0,173	0,182	0,190	1,269	1,273	1,302	1,381	1,480	0,757
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,773	3,523	3,411	3,325	3,184	0,759	0,690	0,716	0,729	0,730	2,184
17	Jasa Lainnya	0,000	1,500	1,570	1,300	1,320	0,830	0,820	0,870	0,850	0,870	0,993

Sumber: Hasil Analisis, 2026

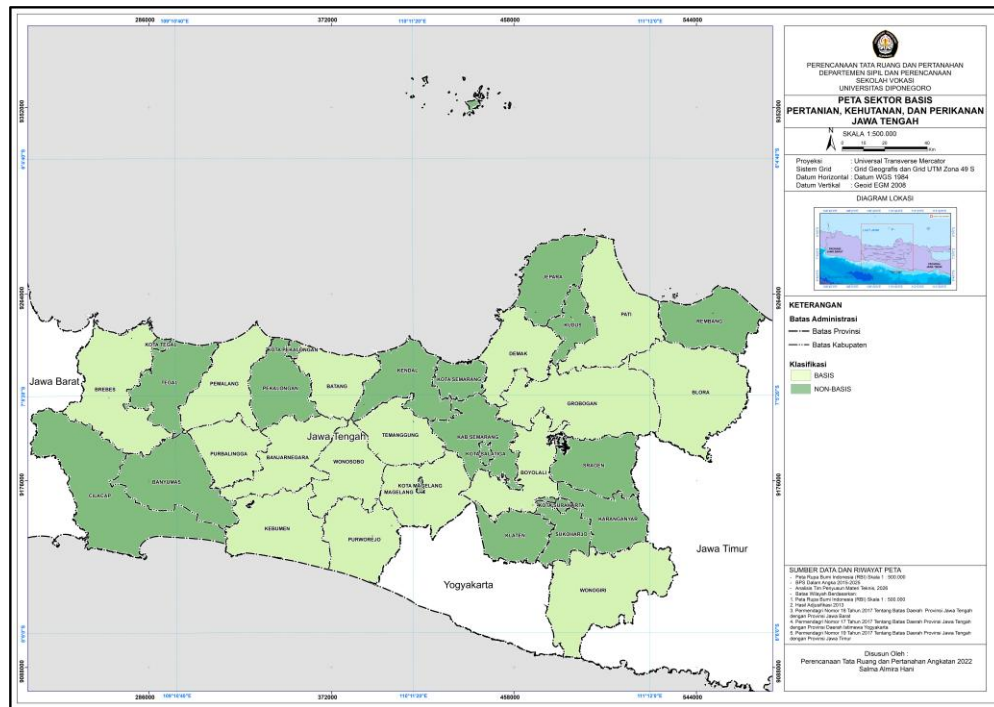
Hasil analisis sektor berdasarkan lapangan usaha di Jawa Tengah di dominasi pada pertanian, industri pengolahan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, serta transportasi pengadaan, jasa kesehatan, jasa lainnya. Sektor berdasarkan lapangan usaha di Jawa Tengah tersebut tergolong dominan dibandingkan dengan Indonesia. Berikut merupakan sektorr basis berdasarkan lapangan usaha di kabupaten/kota berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha di setiap sektornya.

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis di Provinsi Jawa Tengah selama seluruh periode pengamatan dari tahun 2015 hingga 2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Location Quotient* (LQ) yang secara konsisten berada di atas angka satu pada setiap tahunnya, yang berarti bahwa kontribusi sektor ini terhadap total PDRB di wilayah kajian cenderung lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Konsistennya sektor basis pertanian selama 10 tahun memperlihatkan bahwa keunggulan yang komperatif pada bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Keunggulan ini didukung oleh kondisi geografis yang memadai, ketersediaan lahan pertanian yang luas, serta tradisi masyarakat yang telah lama bergantung pada sektor primer sebagai mata pencaharian utama.

Berdasarkan peta sebaran di bawah, terlihat kabupaten/kota yang menyumbang pertanian secara basis di Jawa Tengah sebagai berikut ini



Sumber: Hasil Analisis, 2026

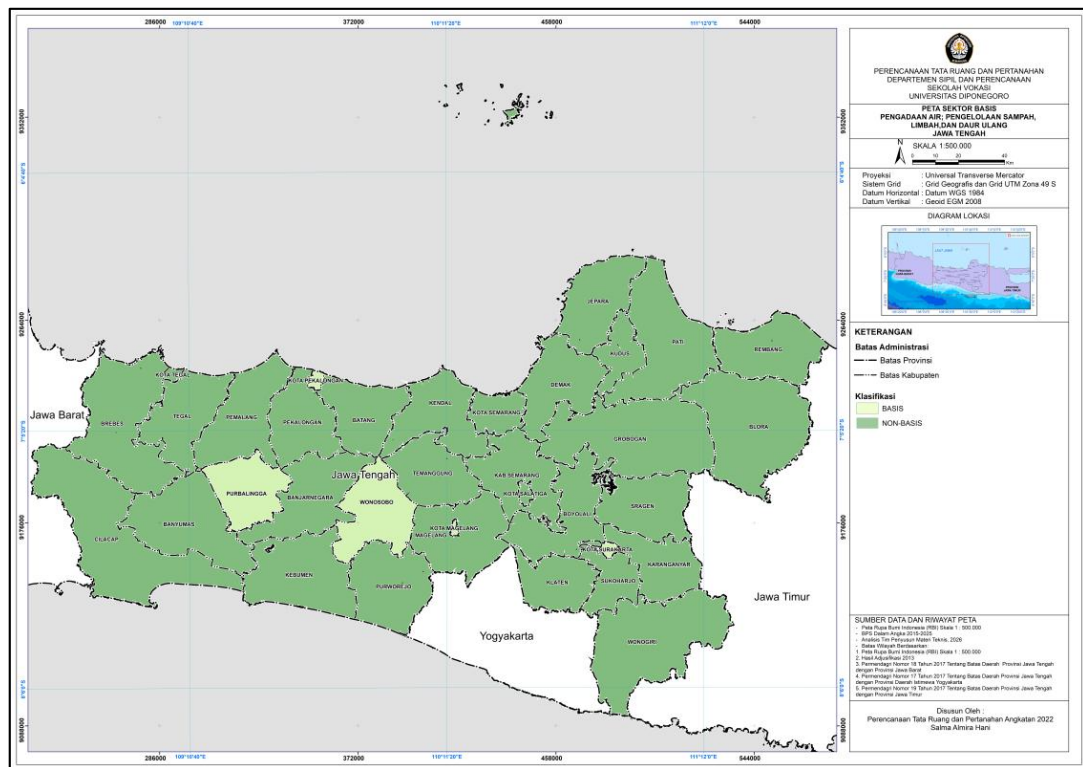
Gambar 4.2.1 Peta Sebaran Sektor Basis Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Jawa Tengah 2024

Peta di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Jawa Tengah, terutama yang berada di jalur pantai utara, pantai selatan bagian barat, dan wilayah pegunungan tengah, terklasifikasi sebagai sektor basis ($LQ > 1$) untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Wilayah yang tergolong basis antara lain Brebes, Pemalang, Batang, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Boyolali, Demak, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Wonogiri. Sebaliknya, wilayah yang bercorak perkotaan atau memiliki struktur ekonomi non-pertanian yang lebih kuat, seperti Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Sragen, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Kendal, Kudus, Cilacap, dan Banyumas, tergolong non-basis. Pola ini menegaskan bahwa keunggulan sektor pertanian secara spasial lebih terkonsentrasi di wilayah pedesaan dengan lahan pertanian luas dibandingkan wilayah perkotaan atau wilayah dengan aglomerasi industri.

2. Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan terlihat konsisten selama 10 tahun dari 2015-2024 berada pada status basis. Nilai LQ yang berada di atas satu mengidentifikasi bahwa sektor industri pengolahan memiliki spesialisasi yang tinggi guna meningkatkan struktur perekonomian daerah. Keunggulan dari industri pengolahan sebagai sektor basis

menunjukkan adanya aglomerasi indutri dengan menyediakan tenaga kerja, infrastruktur pendukung industri, serta kemudahan akses bahan baku menjadi faktor pendorong utama yang memperkuat daya saing sektor ini. Selain itu, keberadaan kawasan industri yang terencana turut mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor industri pengolahan secara berkelanjutan. Berikut peta persebaran kabupaten/kota dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor basis di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.2.2 Peta Sebaran Sektor Basis Pengolahan Jawa Tengah 2024

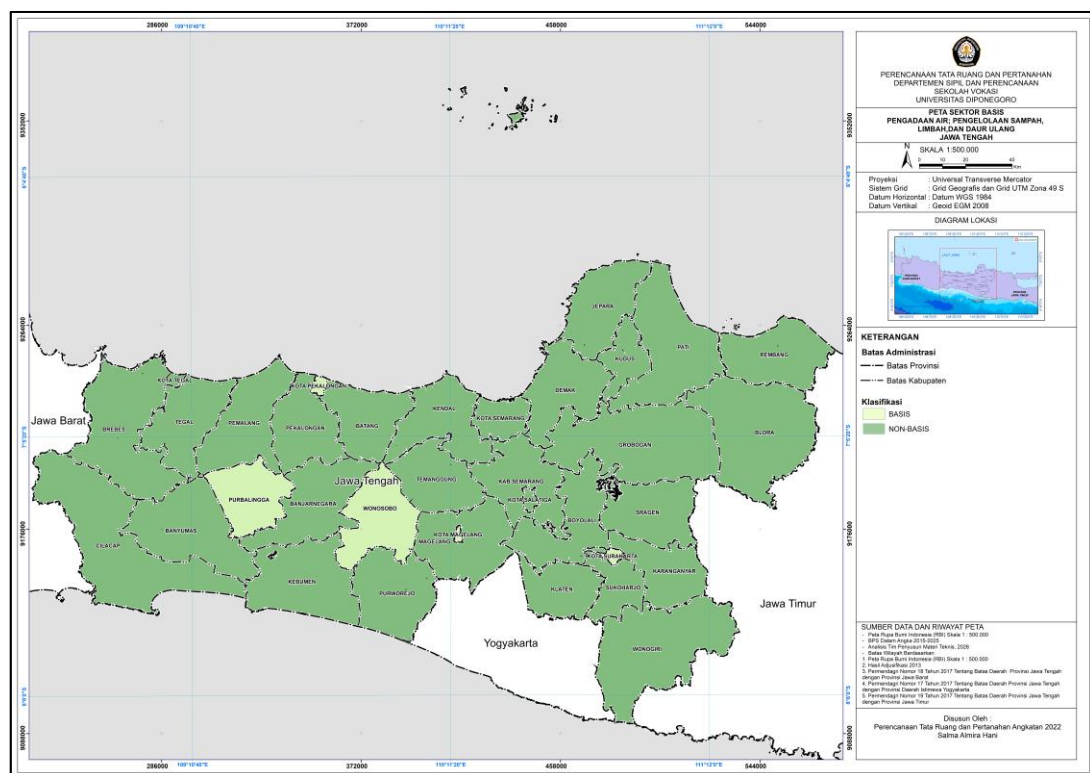
Peta menunjukkan pola yang kontras dengan sektor pertanian, di mana hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah terklasifikasi non-basis untuk sektor industri pengolahan, kecuali Kabupaten Cilacap, Karanganyar dan Kabupaten Kudus yang tergolong basis. Dominasi non-basis pada 33 kabupaten/kota lainnya mengindikasikan bahwa meskipun sektor ini di provinsi memiliki nilai LQ di atas satu, kontribusinya belum tersebar merata dan justru terkonsentrasi pada wilayah dengan aglomerasi industri spesifik. Keberadaan status basis di Cilacap sejalan dengan aktivitas industri pengolahan minyak dan semen skala besar di wilayah tersebut, sementara Kudus dikenal sebagai sentra industri rokok dan elektronik yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

3. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah,dan Daur Ulang

Sektor pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang menunjukkan status basis secara konsisten selama periode 2015 hingga 2024. Nilai LQ yang berada di atas satu pada setiap tahun yang menandakan bahwa sektor ini jauh lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Keunggulan sektor ini dikaitkan dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah yang mencapai 38.233,93 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi salah satu alasan mendorongnya kebutuhan layanan air bersih dan pengelolaan limbah secara intensif. Perlunya juga sanitasi yang memadai untuk memperkuat sektor ini dan adanya pengembangan pada sektor ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan lingkungan hidup yang berkualitas.

Persebaran kabupaten/kota yang memiliki sektor pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebagai sektor basis ditampilkan pada peta beriku.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.2.3 Peta Sebaran Sektor Basis Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah,dan Daur Ulang Jawa Tengah 2024

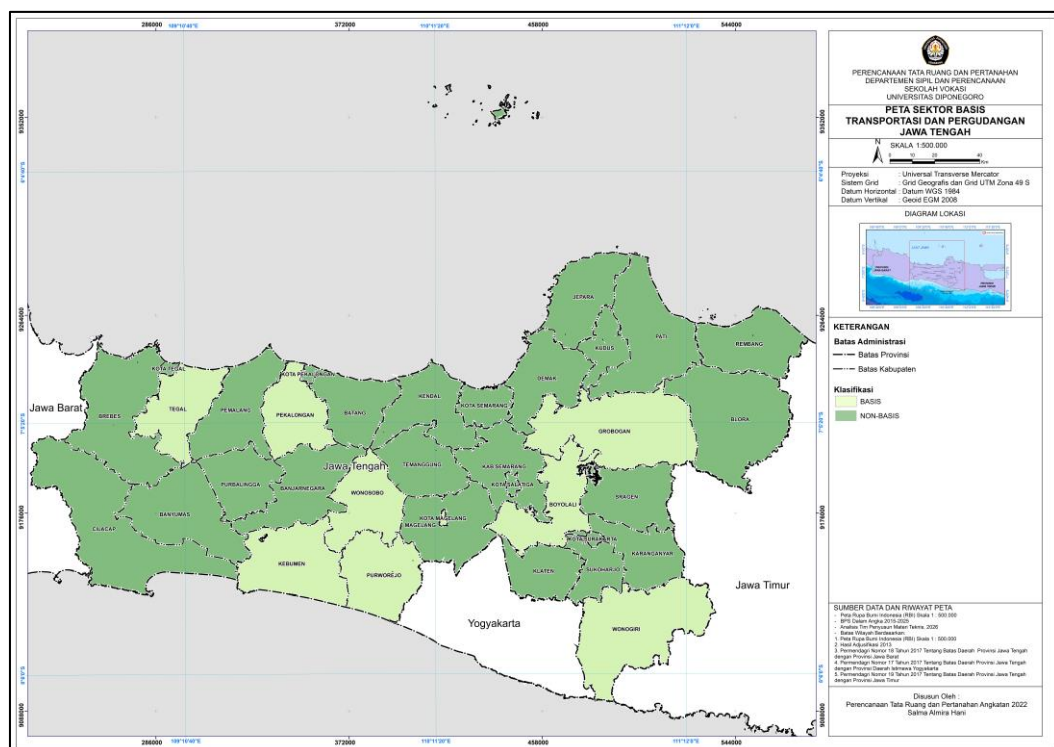
Peta-peta sebelumnya terdapat perbedaan, seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada peta ini terklasifikasi non-basis secara serempak untuk sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Purbalingga, Wonosobo, Magelang,

Surakarta, Pekalongan wilayah yang menonjol sebagai basis. Kondisi ini menunjukkan bahwa keunggulan sektor tersebut mengindikasikan terhadap perekonomian wilayah di kelima daerah itu melebihi kontribusi rata-rata sektor yang sama di tingkat provinsi, sehingga wilayah-wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berpotensi mengeksport jasa maupun hasil pengelolaan sektor ini ke wilayah lain.

4. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Sektor transportasi dan pergudangan tercatat sebagai sektor basis pada periode tahun 2015 hingga 2022. Meskipun pada tahun 2021 dan 2024 sektor ini beralih ke status non-basis, secara rata-rata keseluruhan periode sektor transportasi dan pergudangan tetap dikategorikan sebagai sektor basis. Nilai LQ yang berada di atas satu pada setiap tahun yang menandakan bahwa sektor ini jauh lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Sektor ini mencerminkan akan peran strategis wilayah kajian guna konektivitas dan distribusi barang di Provinsi Jawa Tengah. Jaringan jalan yang memadai akses ke jalur transportasi utama, serta berkembangnya fasilitas pergudangan modern yang mendukung pertumbuhan pada sektor ini. Berikut merupakan peta sebaran kabupaten/kota dengan sektor transportasi dan pergudangan sebagai sektor basis.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

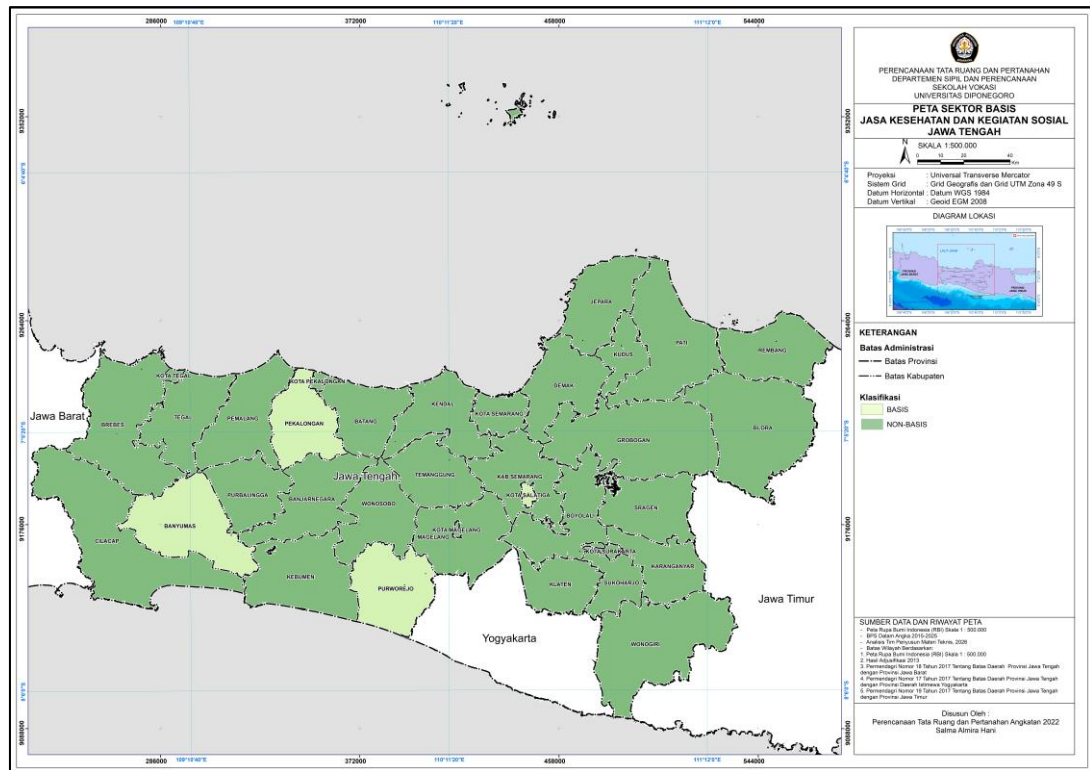
Gambar 4.2.4 Peta Sebaran Sektor Basis Transportasi dan Pergudangan Jawa Tengah 2024

Peta menunjukkan pola sebaran yang cukup beragam, dengan wilayah basis antara lain Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Kota Salatiga, Boyolali, Klaten, Grobogan, Kota Surakarta, Sukoharjo, dan Wonogiri. Sementara itu, wilayah non-basis mendominasi kawasan pantai utara bagian barat dan timur seperti Brebes, Kota Tegal, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, serta beberapa wilayah selatan seperti Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Pola ini mencerminkan bahwa keunggulan sektor transportasi dan pergudangan tidak selalu berkorelasi langsung dengan wilayah pesisir yang memiliki pelabuhan, melainkan lebih dipengaruhi oleh posisi strategis wilayah dalam jaringan distribusi darat regional.

5. Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor basis yang konsisten dari tahun 2015 hingga 2024. Nilai LQ yang berada di atas satu menunjukkan bahwa wilayah kajian memiliki kapasitas layanan kesehatan dan kegiatan sosial yang melebihi rata-rata provinsi. Hal ini mencerminkan komitmen daerah dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebagai sektor basis memiliki manfaat guna penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu program sosial kemasyarakatan turut memperkuat sektor ini terutama saat masa pandemi COVID-19 (2019-2020) yang perlunya penambahan fasilitas dan tenaga medis di daerah. Persebaran kabupaten/kota dengan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebagai sektor basis di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.2.5 Peta Sebaran Sektor Basis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jawa Tengah 2024

Peta ini menunjukkan sebaran status pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah berdasarkan analisis LQ. Wilayah yang tergolong progresif (warna hijau muda) hanya terdapat pada empat wilayah, yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purworejo. Keempat wilayah ini tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa keunggulan pertumbuhan sektor kesehatan dan kegiatan sosial di Jawa Tengah masih terkonsentrasi pada wilayah di bagian barat hingga tengah, sementara wilayah-wilayah dengan fasilitas kesehatan besar berskala provinsi seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta justru tergolong mundur, kemungkinan karena pertumbuhannya sudah tinggi sejak awal periode sehingga laju pertumbuhan relatif menjadi lebih rendah dibandingkan wilayah yang sedang berkembang pesat.

Berdasarkan peta diatas maka didapatkan area persebaran sebagai berikut dilihat dari nilai LQ di setiap Kabupaten Kota yang terlampir pada lampiran 3 dan 4.

Tabel 4.2 Nilai LQ Jawa Tengah 2015-2024

No	Sektor Basis	Lokasi
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Wonogiri, Grobogan, Blora, Pati, Demak, Temanggung, Batang, Pemalang dan Brebes.
2.	Industri Pengolahan	Kabupaten Cilacap, Karanganyar, Kudus
3.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Purbalingga, Wonosobo, Magelang, Surakarta, Pekalongan
4.	Transportasi dan Pergudangan	Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Wonogiri, Grobogan, Jepara, Temanggung, Pekalongan, Tegal
5.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Kabupaten Banyumas, Purworejo, Pekalongan, Kota Salatiga

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan area persebaran, sektor pertanian tergolong paling banyak di setiap Kabupaten sebagai sektor basis. Kemudian disusul dengan transportasi dan pergudangan hal terlihat mengindikasikan dua sektor tersebut memang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

4.3 Analisis Sektor Progresif

Analisis *shift-share* digunakan dalam mengidentifikasi kinerja serta daya saing dari setiap sektor ekonomi di suatu wilayah jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih besar referensinya. Analisis *shift-share* merupakan analisis lanjutan dari hasil LQ, dimana analisis LQ untuk mengidentifikasi sektor basis sedangkan *shift-share* untuk mengetahui sektor yang bertumbuh. Berdasarkan hasil analisis setiap sektornya dikategorikan sebagai progresif jika adanya daya saing yang lebih tinggi dari rerata wilayah referensi, atau mundur jika pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan sektor lainnya.

Hasil *shift-share* periode 2015-2024 menunjukkan dari 17 sektor menurut lapangan usaha yang dianalisis terdapat dua kategori hasil yaitu progresif dan mundur. Sebagian

sektor menunjukkan hasil yang progresif yang menandakan bahwa wilayah Jawa Tengah memiliki daya saing yang cukup kuat di berbagai bidang. Berikut merupakan hasil nilai KKPW dimana >0 maka sektor tersebut termasuk progresif dan <0 bernilai mundur.

Tabel 4.3 Nilai Shift-Share Jawa Tengah 2015-2024

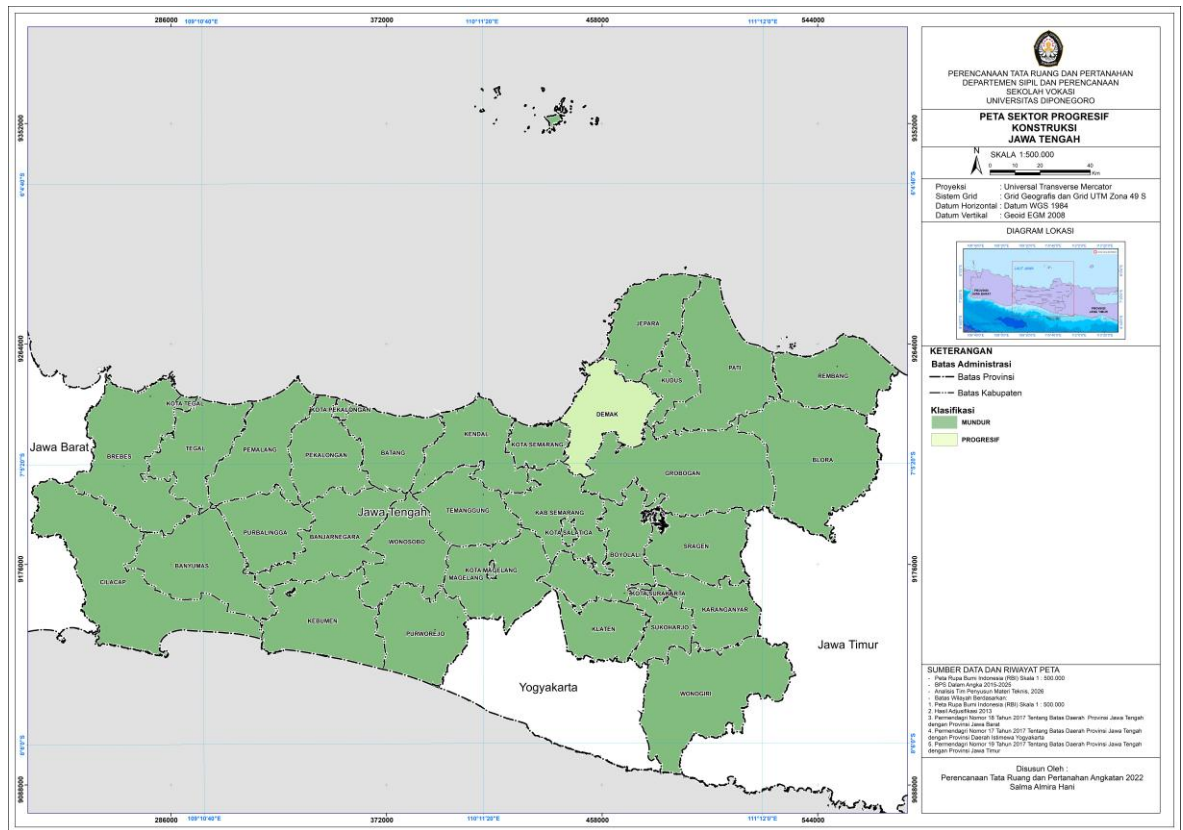
SEKTOR	2015-2016	2017-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024	Rerata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,02	-0,02	0,04	-0,02	-0,04	-0,01
Pertambangan dan Penggalian	0,14	-0,02	0,01	-0,11	-0,02	0,00
Industri Pengolahan	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,03	0,04	-0,67	-0,01	0,02	-0,13
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,00	0,00	-0,32	-0,04	-0,04	-0,08
Konstruksi	-0,10	-0,01	2,55	-0,03	0,03	0,49
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,02	0,00	201,40	-0,01	-0,01	40,27
Transportasi dan Pergudangan	0,00	-0,01	-0,17	0,68	0,00	0,10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01	0,04	23,29	-0,98	0,02	4,48
Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	12,02	-0,02	0,04	2,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,02	0,04	-0,05	-0,04	-0,03	-0,01
Real Estat	0,05	0,04	1,90	0,00	0,01	0,40
Jasa Perusahaan	0,04	0,03	1,24	0,01	0,03	0,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,02	0,01	0,33	0,01	0,02	0,08
Jasa Pendidikan	0,06	0,05	8,78	-0,06	0,05	1,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,02	-0,01	-0,61	-0,02	0,02	-0,13
Jasa Lainnya	0,03	0,03	-0,57	0,07	0,02	-0,09

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan hasil analisis shift-share pada Tabel 4.2 terdapat hasil pola yang konsisten di seluruh sektor ekonomi selama periode penelitian. Pada periode 2015 - 2016 dan 2017 - 2018 sebagian besar sektor bernilai progresif, yang menandakan kondisi perekonomian yang telah tumbuh sebaran dinamis dan memiliki daya saing yang tinggi. Perubahan terjadi mulai periode 2019 - 2020 terjadi kemunduran secara masif di sebagian besar sektor. Kemunduran ini tidak terlepas dari dampak pandemi yang melanda sehingga mengakibatkan adanya penurunan daya saing yang relatif signifikan di seluruh sektor. Pada periode 2023 - 2024 kondisi sedikit membaik meskipun sebagian sektor masih mengalami kemunduran. Berikut merupakan progresivitas kabupaten/kota berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha di setiap sektornya

1. Konstruksi

Sektor konstruksi mengalami fluktuatif pada rentang tahun 2019-2020 dan juga 2023-2024. Nilai tertinggi pada sektor ini 2,55. Sektor konstruksi berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, perumahan, dan properti yang menjadi penopang bagi pertumbuhan sektor-sektor lain di Jawa Tengah. Dari sisi realisasi investasi, sektor ini menempati peringkat ke-9 dari 17 sektor dengan rata-rata investasi sebesar 688,6 miliar rupiah pada periode 2020-2024. Hasil analisis shift-share menunjukkan kinerja daya saing sektor konstruksi yang fluktuatif sepanjang 2015-2024. Pada periode 2015-2016 dan 2017-2018, sektor ini berstatus mundur dengan nilai berturut-turut -0,10 dan -0,01, menandakan pertumbuhannya masih di bawah rata-rata provinsi.



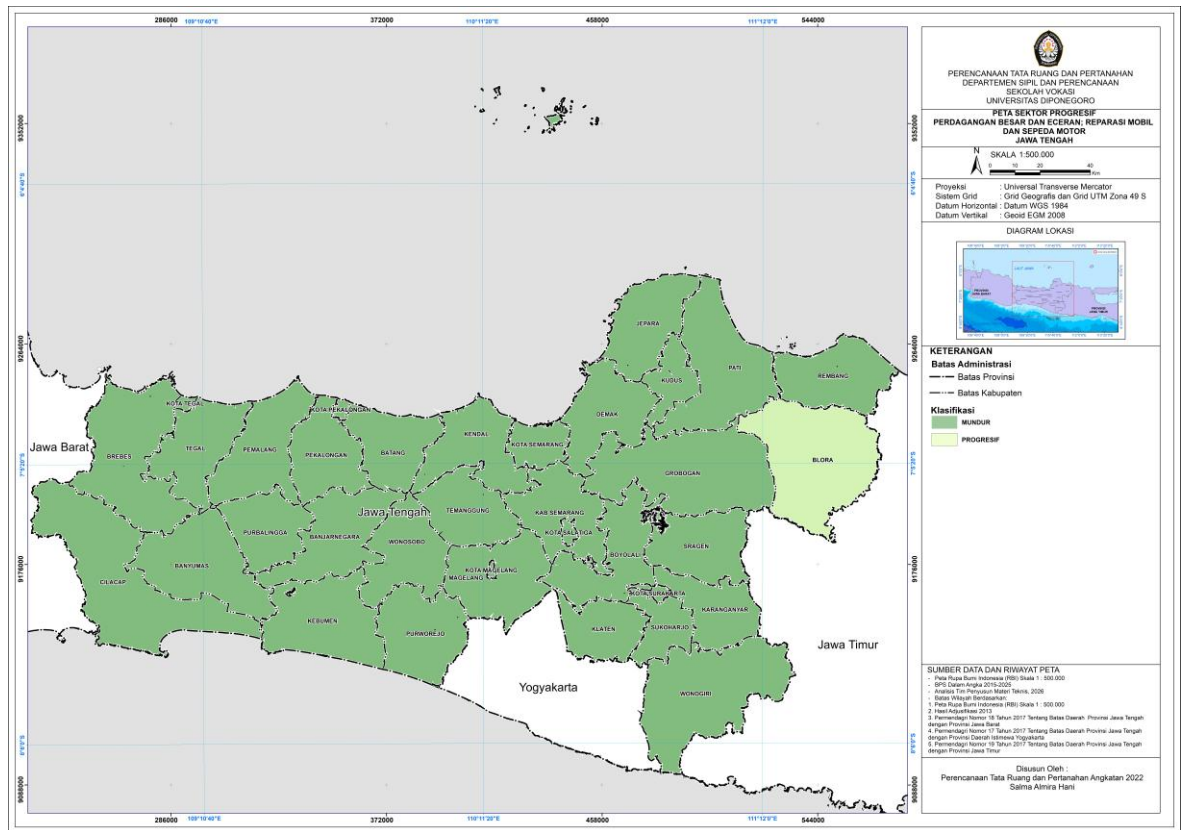
Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.3.1Peta Sebaran Sektor Konstruksi Progresif di Jawa Tengah 2024

Sektor ini kembali berstatus mundur pada periode 2021-2022 dengan nilai $-0,03$, yang kemungkinan berkaitan dengan tekanan kenaikan harga bahan bangunan serta belum pulihnya sepenuhnya aktivitas investasi properti pascapandemi. Pada periode 2023-2024, sektor konstruksi kembali berstatus progresif meski tipis, dengan nilai $0,03$, seiring mulai Bergeraknya kembali pembangunan infrastruktur dan proyek strategis di daerah. Secara keseluruhan, dengan nilai rata-rata $0,49$, sektor konstruksi dikategorikan sebagai sektor progresif, meskipun capaian ini sangat ditentukan oleh lonjakan pada periode 2019-2020 dan tidak konsisten pada periode-periode lainnya. Pada tingkat kabupaten/kota, hanya terdapat di Kabupaten Demak yang tergolong progresif untuk sektor ini, sehingga keunggulan daya saing konstruksi Jawa Tengah lebih bersifat agregat di tingkat provinsi dan belum terlalu menonjol pada wilayah lainnya.

2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan salah satu sektor dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Tengah, yaitu peringkat ke-2 dari 17 sektor dengan rata-rata investasi mencapai 12.327,5 miliar rupiah pada periode 2020-2024, mencerminkan peran besarnya dalam menopang konsumsi dan distribusi barang masyarakat.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

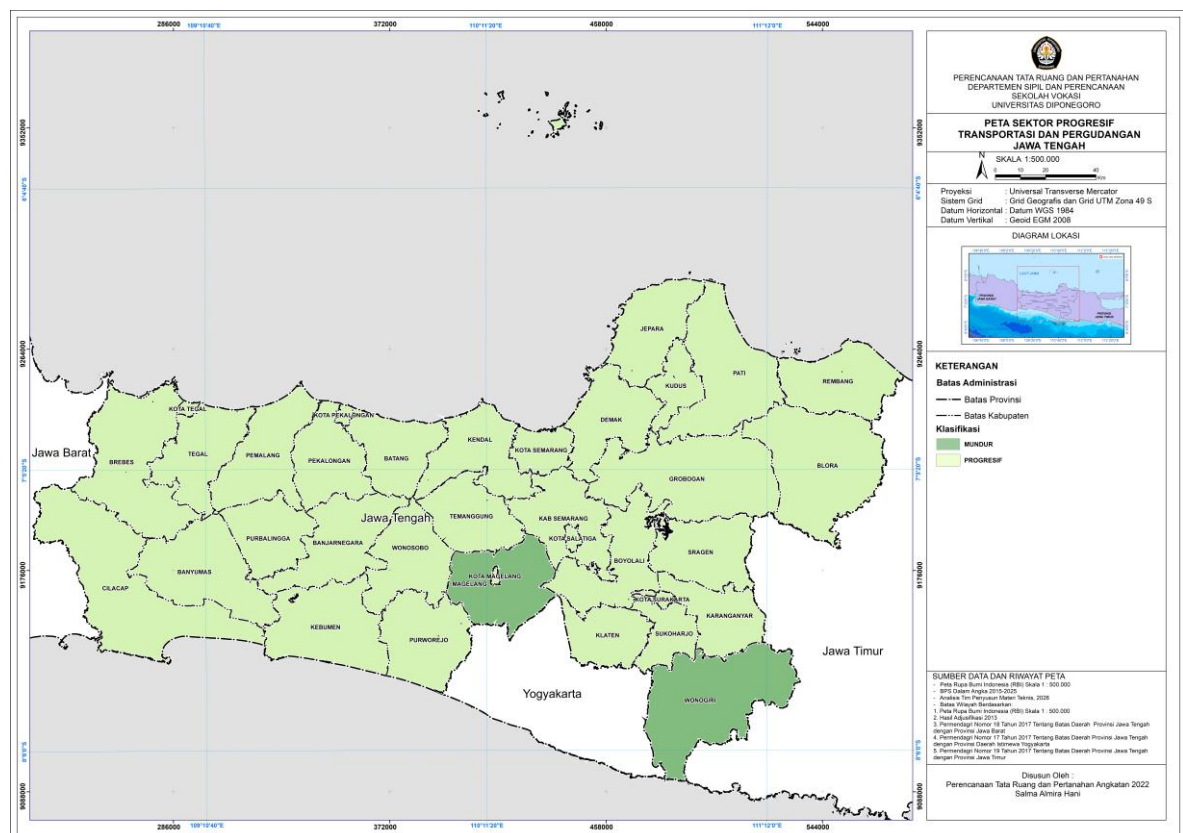
Gambar 4.3.2 Peta Sebaran Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Progresif di Jawa Tengah 2024

Hasil analisis shift-share menunjukkan status mundur pada periode 2015-2016 dengan nilai -0,02, kemudian membaik menjadi progresif pada periode 2017-2018 meski nilainya mendekati nol (0,00). Pada periode 2019-2020, sektor ini mencatatkan lonjakan nilai yang sangat ekstrem yaitu 201,40, jauh melampaui nilai sektor mana pun pada periode yang sama. Lonjakan ini diduga berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat pada awal masa pandemi, seperti peningkatan permintaan kebutuhan pokok serta percepatan adopsi perdagangan daring oleh pelaku usaha sebagai respons atas pembatasan mobilitas. Tercatat Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), selama pandemi penjualan e-commerce meningkat 26% dengan konsumen baru sebesar 51%. Pembayaran digital juga ikut meningkat dengan adanya penggunaan teknologi. Sehingga aktivitas ekonomi di e-commerce tercatat naik mencapai 40,6% selama tahun 2020 masa pandemi (Ayu & Lahmi, 2020)

3. Transportasi dan Pergudangan

Sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor yang berperan penting sebagai penunjang mobilitas barang dan jasa serta konektivitas antar wilayah. Pada periode 2015–

Secara keseluruhan, sektor transportasi dan perdagangan dikategorikan sebagai sektor yang fluktuatif dengan kecenderungan progresif pada periode-periode tertentu yang bertepatan dengan momentum pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas logistik regional. Sebaran kabupaten/kota yang memiliki sektor transportasi dan perdagangan sebagai sektor progresif ditunjukkan pada peta berikut.

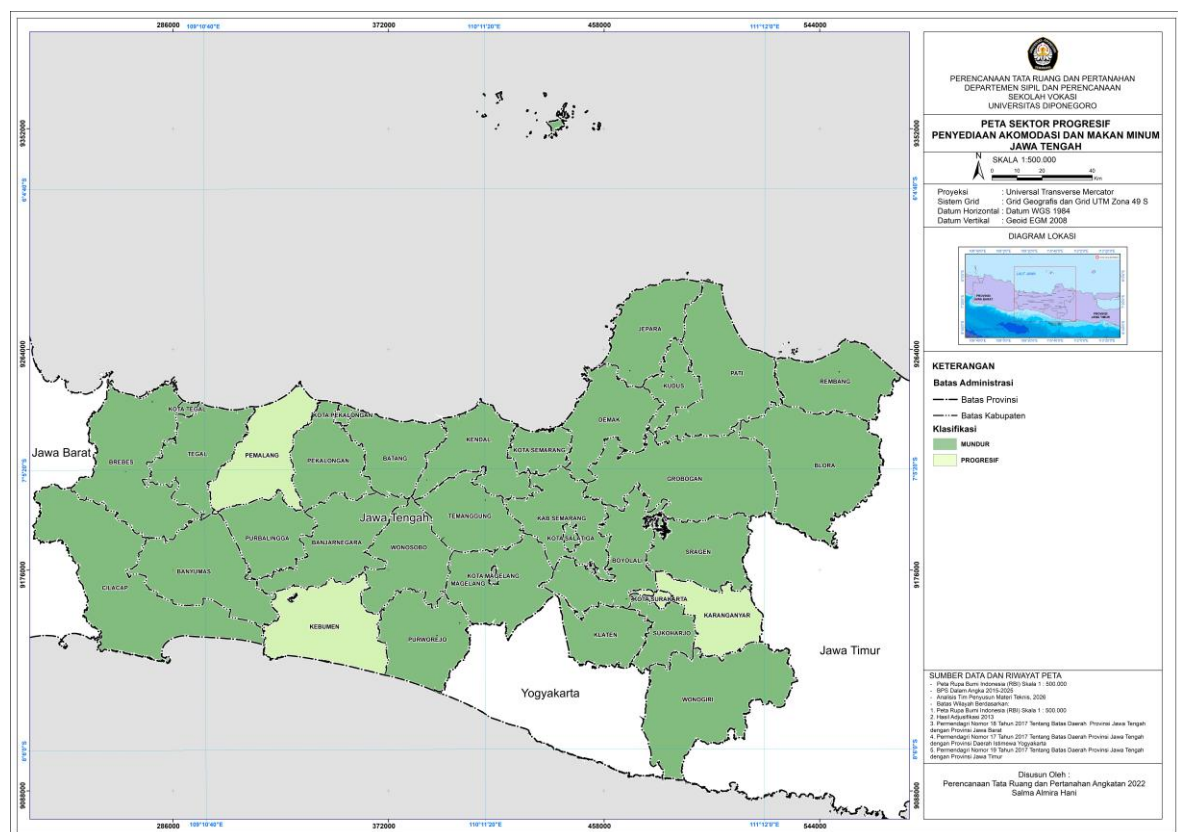


Gambar 4.3.3 Peta Sebaran Sektor Transportasi dan Pergudangan Progresif di Jawa Tengah 2024

Peta sebaran sektor progresif menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tergolong progresif untuk sektor transportasi dan perdagangan, kecuali Kota Magelang beserta Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonogiri yang tergolong mundur. Dominasi status progresif pada hampir seluruh wilayah ini konsisten dengan penjelasan sebelumnya bahwa sektor ini secara umum mengalami pertumbuhan yang melampaui rata-rata provinsi, terutama didorong oleh pemulihan aktivitas logistik pascapandemi dan perkembangan perdagangan daring

4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami penurunan yang terlihat signifikan pada tahun 2021-2022 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 - 2024. Nilai tertinggi pada sektor ini mencapai 2,33 pada tahun 2019 - 2020. Dikarenakan pada tahun tersebut masa pandemi dimana meningkatkan akan konsumsi sehingga berpengaruh pada sektor tersebut.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.3.4 Peta Sebaran Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Progresif di Jawa Tengah 2024

Peta menunjukkan bahwa hanya tiga wilayah yang tergolong progresif untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten

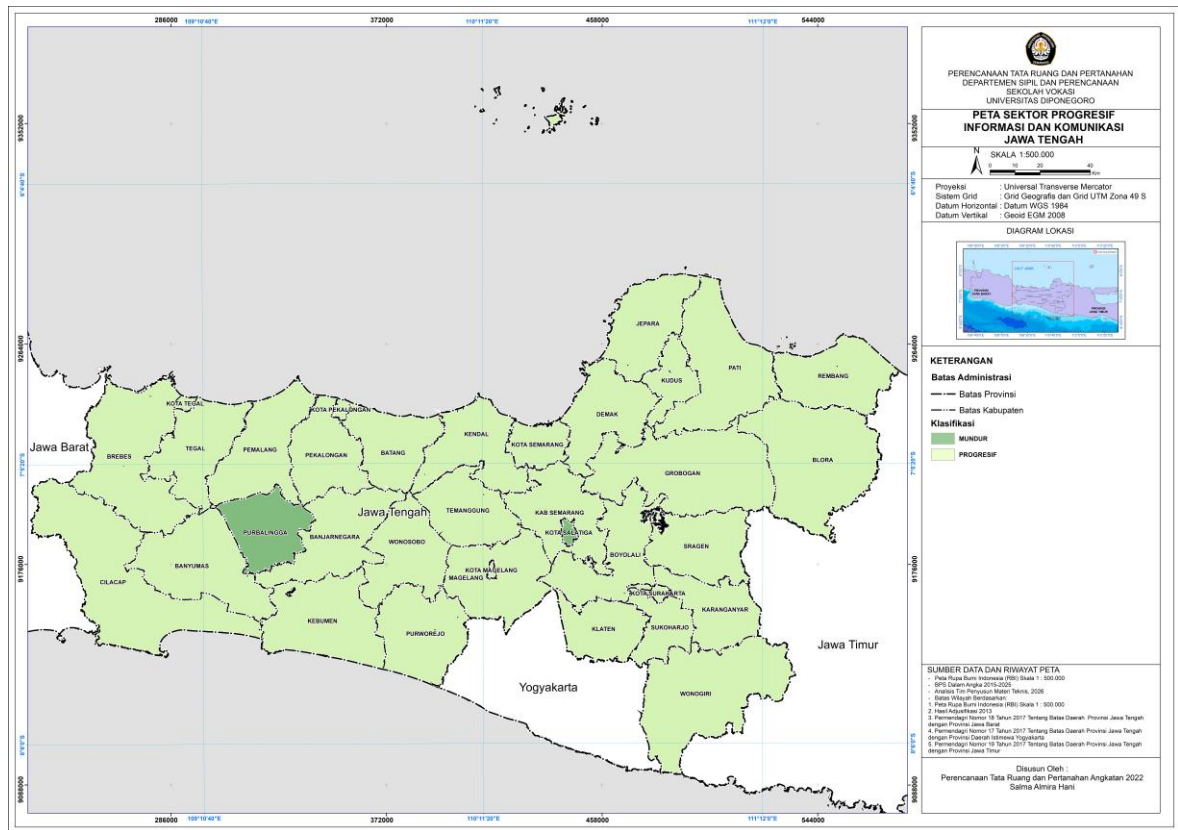
Kebumen, dan Kabupaten Karanganyar, sementara 32 kabupaten/kota lainnya tergolong mundur. Terbatasnya wilayah dengan status progresif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum belum merata di seluruh Jawa Tengah, dan hanya terkonsentrasi pada beberapa wilayah yang memiliki daya tarik wisata atau aktivitas ekonomi pendukung pariwisata yang berkembang lebih pesat dibandingkan rata-rata provinsi.

5. Informasi dan Komunikasi

Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan menjadi salah satu sektor dengan ketahanan daya saing tertinggi dalam periode penelitian. Pada periode 2015 - 2016 dan 2017 - 2018, sektor ini berstatus progresif yang mencerminkan pesatnya adopsi teknologi informasi dan digital di berbagai wilayah Jawa Tengah, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan layanan telekomunikasi.

Meskipun pada periode 2019 - 2020 mengalami kemunduran secara relatif dibandingkan pertumbuhan provinsi, sektor ini tetap tumbuh secara absolut akibat meningkatnya kebutuhan layanan digital selama pandemi. Pada periode 2021 - 2022 kembali berstatus progresif, namun pada 2023 - 2024 kembali mundur. Secara keseluruhan, sektor Informasi dan Komunikasi dikategorikan progresif, mencerminkan transformasi digital yang terus berlangsung di berbagai kabupaten/kota.

Sebaran kabupaten/kota yang memiliki sektor informasi dan komunikasi sebagai sektor progresif ditunjukkan pada peta berikut.



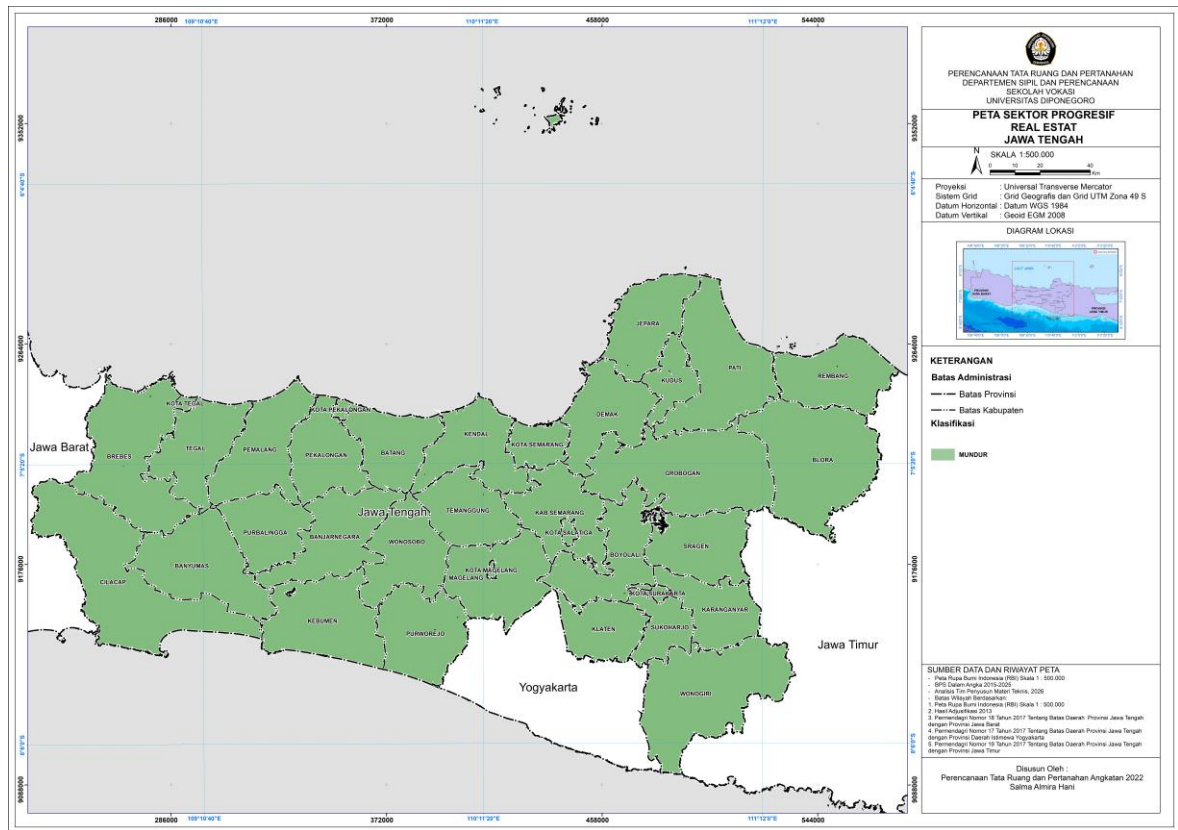
Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.3.5 Peta Sebaran Sektor Progresif Informasi dan Komunikasi Jawa Tengah 2024

Peta memperlihatkan bahwa sektor informasi dan komunikasi tergolong progresif di hampir seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah, kecuali Kabupaten Purbalingga dan Kota Salatiga yang tergolong mundur. Luasnya wilayah dengan status progresif ini menegaskan bahwa transformasi digital dan peningkatan penetrasi layanan telekomunikasi telah berlangsung secara merata di berbagai kabupaten/kota, sejalan dengan uraian sebelumnya mengenai pesatnya adopsi teknologi informasi di Jawa Tengah.

6. Real Estat

Sektor *real estat* menunjukkan kinerja yang mengalami kemunduran pada periode 2015 - 2024 berkaitan dengan perlambatan transaksi properti akibat ketidakpastian ekonomi. Sebaran kabupaten/kota yang memiliki sektor *real estat* sebagai sektor progresif ditunjukkan pada peta berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.3.6 Peta Sebaran Sektor Progresif Real Estat di Jawa Tengah 2024

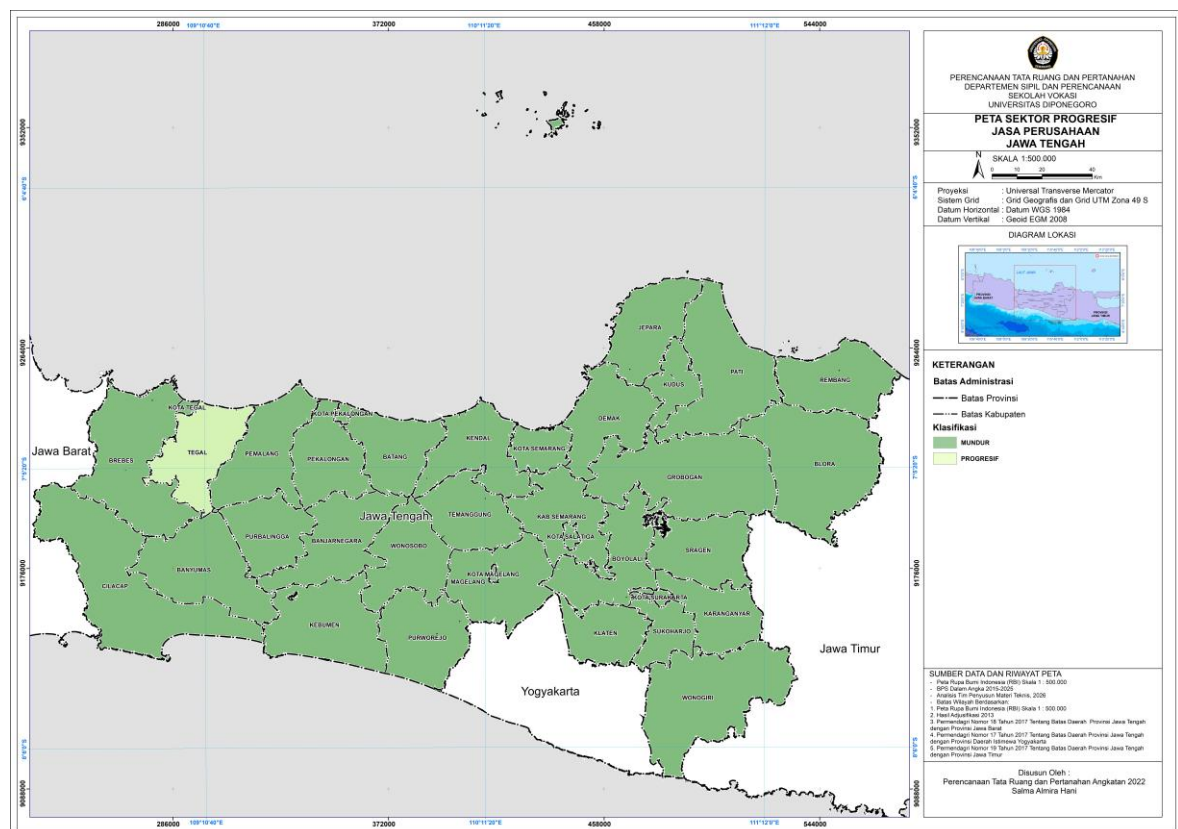
Berbeda dengan peta-peta sektor progresif lainnya, peta ini menunjukkan bahwa seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terklasifikasi mundur secara serempak untuk sektor Real Estat, tanpa ada satu wilayah pun yang tergolong progresif. Kondisi ini serupa dengan temuan pada sektor administrasi pemerintahan, di mana nilai shift share yang progresif hanya terlihat pada level agregat Provinsi Jawa Tengah dibandingkan rata-rata nasional, namun ketika dianalisis pada level kabupaten/kota, tidak ada wilayah yang tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi, sehingga pertumbuhan sektor *real estat* cenderung merata tanpa ada wilayah yang tumbuh secara tinggi di salah satu wilayah.

7. Jasa Perusahaan

Sektor jasa perusahaan mencakup berbagai layanan profesional dan bisnis yang mendukung operasional sektor-sektor lainnya. Hasil analisis *shift-share* menunjukkan bahwa sektor ini berstatus progresif pada periode 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2019 - 2020, 2021 - 2022, dan 2023 - 2024, yang mencerminkan pertumbuhan permintaan terhadap layanan konsultasi, hukum, akuntansi, dan jasa profesional lainnya yang melampaui rata-rata provinsi.

Periode 2019 - 2020 bahkan tetap mengalami prograssifitas di pandemi yang dimana Jawa Tengah masih bisa menjaga stabilitas pada sektor tersebut. Pemulihan yang terjadi pada periode berikutnya mengindikasikan meningkatnya kebutuhan layanan profesional seiring dengan aktivitas investasi dan pengembangan usaha yang kembali menggeliat. Secara keseluruhan, sektor Jasa Perusahaan dikategorikan progresif.

Sebaran kabupaten/kota yang memiliki sektor Jasa Perusahaan sebagai sektor progresif ditunjukkan pada peta berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.3.7 Peta Sebaran Sektor Progresif Jasa Pemerintahan di Jawa Tengah 2024

Peta menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Tegal yang tergolong progresif untuk sektor jasa perusahaan, sementara 34 kabupaten/kota lainnya tergolong mundur. Keseluruhan pada sektor jasa perusahaan dikategorikan progresif di tingkat provinsi, sebaran spasialnya menunjukkan bahwa pertumbuhan signifikan layanan konsultasi, hukum, akuntansi, dan jasa profesional lainnya masih sangat terbatas pada satu wilayah saja.

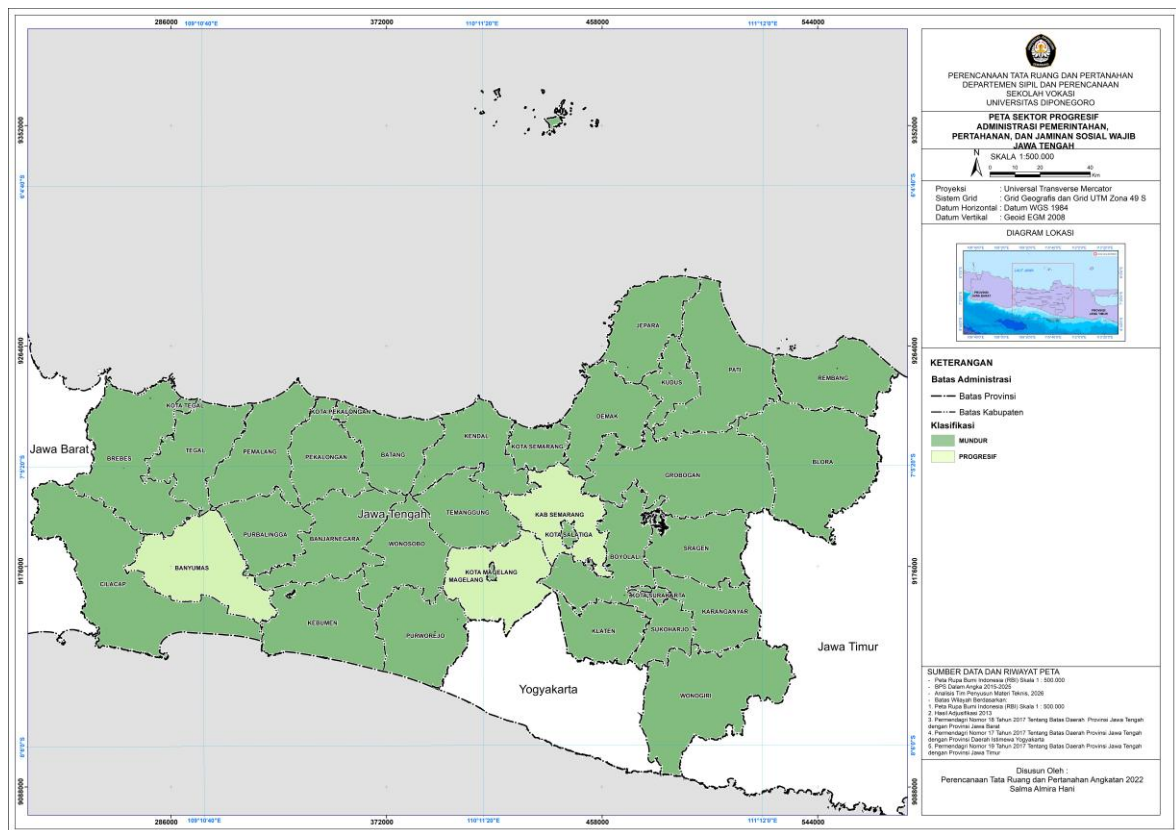
8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten selama periode penelitian. Pada periode 2015 - 2016

dan 2017 - 2018, sektor ini berstatus progresif yang mencerminkan pertumbuhan belanja pemerintah dan penguatan kapasitas aparatur daerah yang melampaui rata-rata provinsi. Hal ini berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Periode 2019 - 2020 mencatat status mundur yang dipengaruhi oleh relokasi anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi. Namun, sektor ini kembali berstatus progresif pada periode 2021 - 2022 dan 2023 - 2024, sejalan dengan normalisasi belanja pemerintah dan penguatan program perlindungan sosial pascapandemi. Secara keseluruhan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dikategorikan progresif.

Sektor ini, nilai *shift-share* di Jawa Tengah bernilai progresif, namun pada *shift-share* kabupaten/kota pada sektor ini tidak ada yang bernilai progresif. Hal ini terjadi dikarenakan proporsi relatif. Ketika sektor tersebut bernilai progresif di Jawa Tengah, artinya sektor itu secara proporsional lebih besar di Jawa Tengah dibanding rata-rata nasional tapi, ketika dilihat per kabupaten/kota, tidak ada satu pun yang tumbuh lebih cepat dari rata-rata Jawa Tengah. Artinya sektor tersebut tumbuh merata tapi tidak ada yang istimewa di tingkat kabupaten/kota.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.3.8 Peta Sebaran Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib di Jawa Tengah 2024

Peta memperlihatkan bahwa wilayah dengan status progresif untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial Wajib meliputi Kabupaten Banyumas, Kota Magelang beserta Kabupaten Magelang, serta Kabupaten Semarang beserta Kota Salatiga, sementara kabupaten/kota lainnya tergolong mundur. Sebaran yang terbatas pada beberapa klaster wilayah ini mengindikasikan bahwa penguatan belanja pemerintah dan kapasitas aparatur daerah tidak terjadi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki peran administratif atau fungsi kelembagaan yang lebih dominan.

9. Jasa Pendidikan

Sektor jasa pendidikan mencerminkan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia di Jawa Tengah. Hasil analisis *shift share* menunjukkan bahwa sektor ini berstatus progresif pada periode 2015–2016, 2017–2018, 2021–2022, dan 2023–2024. Kinerja yang positif ini mencerminkan pertumbuhan layanan pendidikan formal maupun non-formal yang melampaui rata-rata provinsi, didorong oleh peningkatan akses pendidikan dan pengembangan institusi pendidikan di berbagai kabupaten/kota.

Bedasarkan keseluruhan peta diatas terlihat bahwa daerah yang mengalami peningkatan daya saing yang progresif berada pada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Tabel 4.4 Persebaran Shift-Share Jawa Tengah 2015-2024

No.	Sektor Progresif	Lokasi
1.	Konstruksi	Kabupaten Demak
2.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Kabupaten Blora
3.	Transportasi dan Pergudangan	Seluruh Kabupaten/Kota Kecuali Kabupaten Wonogiri dan Kota Magelang
4.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Kabupaten Kebumen, Karanganyar, Pemalang, Kota Surakarta,
5.	Informasi dan Komunikasi	Semua Kabupaten Kota Kecuali Kabupaten Purbalingga dan Kota Salatiga
6.	Real Estat	Tidak ada yang progresif
7.	Jasa Perusahaan	Kabupaten Tegal
8.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang
9.	Jasa Pendidikan	Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kendal

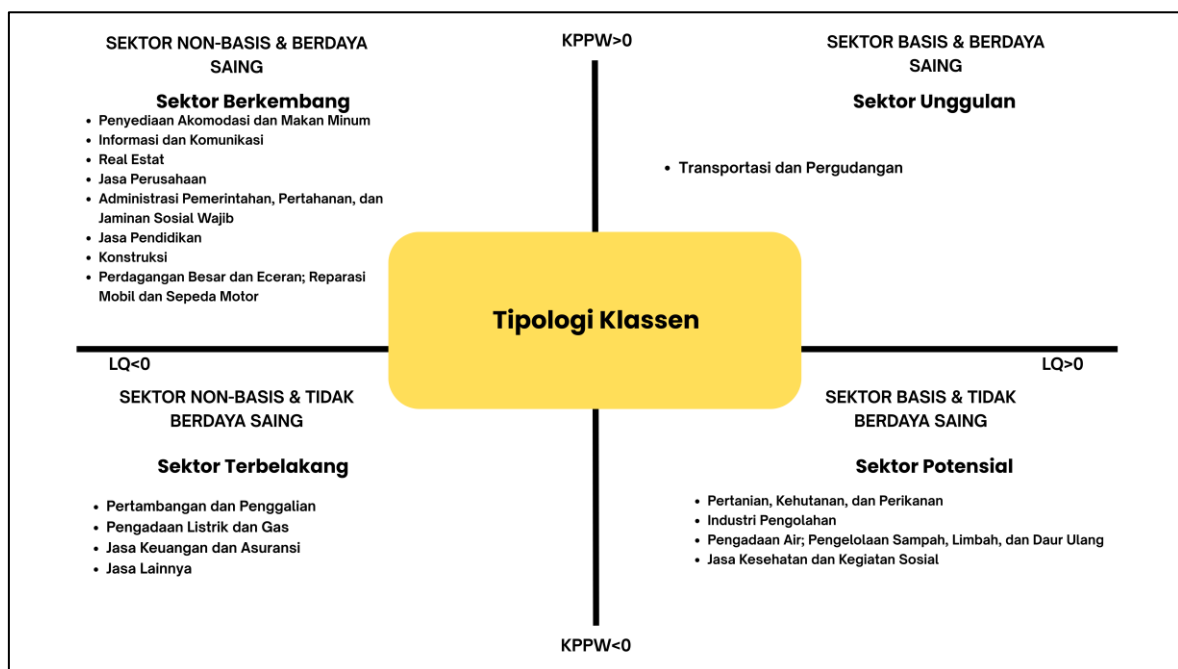
Sumber: Hasil Analisis, 2026

Daerah dengan nilai progresif mendominasi berada pada sektor transportasi dan pergudangan serta informasi dan komunikasi. Hal ini menandakan pada kedua sektor tersebut sudah merata di setiap Kabupaten/Kota. Namun, pada sektor *real estat* bernilai progresif di Jawa Tengah tetapi pada daerah Kabupaten/Kota tidak ada yang memiliki progresif. Fenomena ini nilai rata-rata provinsi pada sektor ini sudah relatif tinggi (didorong oleh pertumbuhan properti yang masif di beberapa titik, terutama kawasan aglomerasi perkotaan), maka tidak ada kabupaten/kota pun yang mampu tumbuh melampaui rata-rata provinsi tersebut, meskipun sebagian besar wilayah tetap mengalami pertumbuhan positif secara absolut.

Pertumbuhan sektor *real estat* di Jawa Tengah bersifat merata namun tidak menonjol di satu wilayah tertentu, berbeda dengan sektor transportasi dan pergudangan serta Informasi dan Komunikasi yang keunggulan pertumbuhannya justru tersebar luas dan konsisten di hampir seluruh kabupaten/kota. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan sektor properti di Jawa Tengah didorong secara kolektif oleh banyak wilayah dengan intensitas pertumbuhan yang relatif seragam, sehingga tidak memunculkan wilayah unggulan (*leading region*) yang menonjol dalam sektor tersebut.

4.4 Analisis Sektor Basis yang Berdaya Saing

Analisis *tipologi klassen* dalam penelitian ini berdasarkan analisis sektoral dengan menggunakan hasil Analisis *location quotient* (LQ) sebagai indikator keunggulan basis wilayah dan nilai Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPPW) dari Analisis *shift-share* sebagai indikator daya saing sektoral, sehingga menghasilkan pengelompokan sektor ke dalam empat kuadran sebagai berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.4.1 Diagram Tipologi Klassen

Diagram *tipologi klassen* diatas terbaagi menjadi 4 kuadran berdasarkan nilai LQ sebagai basis wilayah, dan KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah) sebagai nilai daya saing sektor. Pada kuadran 1 terlihat ditempati oleh transportasi dan pergudangan. Sektor pada kuadran ini merupakan sektor unggulan yang berkembang karena memiliki nilai $LQ > 1$ dan daya saing yang progresif dengan nilai $KPPW > 0$. Sektor pada kuadran ini tidak

hanya memenuhi keterbutuhan lokal namun dapat mengekpor ke wilayah lainnya dengan pertumbuhan yang melampaui rata-rata provinsi.

Kuadran II ditempati oleh penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, *real estat*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, konstruksi, dan juga perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Meskipun sektor ini tidak tergolong dalam sektor basis namun memiliki potensi dengan nilai KPPW >1 dimana berdaya saing tinggi dan dapat menjadi sektor unggulan di masa yang datang jika adanya dukungan investasi maupun kebijakan yang mendukung sektor tersebut.

Kuadran III yaitu pertambangan dan penggalan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi, serta jasa lainnya kuadran ini termasuk sektor yang tergolong tertinggal dan belum mampu menjadi sektor basis sehingga berdasarkan hasil analisis termasuk tertinggal pertumbuhannya dan dibawah rata-rata provinsi. Perlunya dorongan pada sektor ini guna meningkatkan nilai investasi sektor.

Terakhir pada kuadran ke IV yang ditempati oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang menjadi sektor basis namun memiliki nilai KPPW <1. Meskipun sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Jawa Tengah namun tiap tahunnya mengalami penurunan. Banyak faktor yang mendasari dari semakin kurangnya lahan persawahan dan juga tenaga kerja petani yang semakin berkurang

4.5 Analisis Sektor Prioritas DPMPTSP

Selain menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis investasi, Location Quotient (LQ), Shift-Share, dan Tipologi Klassen, penelitian ini juga menggali data primer melalui wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi prioritas pengembangan berdasarkan perspektif kelembagaan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai sektor-sektor yang secara kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dipandang strategis untuk dikembangkan, sekaligus sebagai bahan yang memperkuat terhadap hasil analisis kuantitatif yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya.

Tabel 4.5 Sektor Prioritas DPMPTSP

Sektor	Kode
Transportasi dan Pergudangan <i>Sumber : wawancara</i>	<i>PDM_01_14_PTS</i>
Real Estat <i>Sumber : wawancara</i>	<i>PDM_01_14_PTS</i>
Jasa Lainnya <i>Sumber : wawancara</i>	<i>PDM_01_14_PTS</i>
Pengadaan Listrik dan Gas <i>Sumber : wawancara</i>	<i>PDM_01_14_PTS</i>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Sumber : wawancara</i>	<i>PDM_01_14_PTS</i>
Industri Pengolahan <i>Sumber : wawancara</i>	<i>PDM_01_14_PTS</i>

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Keenam sektor ini menunjukkan sektor-sektor yang secara kebijakan dipandang strategis oleh DPMPTSP untuk dikembangkan ke depan, terlepas dari status basis atau daya saingnya berdasarkan perhitungan kuantitatif. Penetapan sektor prioritas oleh DPMPTSP umumnya tidak hanya mempertimbangkan kinerja pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga faktor-faktor lain yang bersifat strategis dan jangka panjang, seperti potensi penyerapan tenaga kerja, daya tarik investasi, arah kebijakan pembangunan daerah (RPJMD/RPJPD), kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, serta faktor kondisi lapangan yang terjadi.

4.6 Sinkronisasi Hasil Analisis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mengukur kebutuhan investasi, analisis Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi status sektor basis, analisis Shift-Share untuk melihat arah pergeseran daya saing sektor, serta analisis Tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan sektor unggulan, berikut merupakan hasil sinkronisasi dari keempat alat analisis tersebut. Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat konsistensi antar-alat analisis dalam menentukan prioritas sektor, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arahan investasi progresif pada

subbab selanjutnya. Adapun hasil sinkronisasi dari 17 sektor ekonomi di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Sinkronisasi Hasil Analisis

NO	SEKTOR	Investasi (juta)	LQ	SHIFT SHARE	TIPOLOGI KLASSEN	HASIL WAWANCARA
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	358157,6 Tertinggi ke 11	BASIS	MUNDUR	Sektor Potensial	Sektor Prioritas
2	Pertambangan dan Penggalian	106179 Tertinggi ke 15	NON- BASIS	MUNDUR	Sektor Terbelakang	Sektor Bukan Prioritas
3	Industri Pengolahan	27186017,4 Tertinggi ke 1	BASIS	MUNDUR	Sektor Potensial	Sektor Prioritas
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9625018,8 Tertinggi ke 3	NON- BASIS	MUNDUR	Sektor Terbelakang	Sektor Prioritas
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	250647,4 Tertinggi ke 12	BASIS	MUNDUR	Sektor Potensial	Sektor Bukan Prioritas
6	Konstruksi	688636,2 Tertinggi ke 9	NON- BASIS	PROGRESIF	Sektor Berkembang	Sektor Bukan Prioritas
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12327497,2 Tertinggi ke 2	NON- BASIS	PROGRESIF	Sektor Berkembang	Sektor Bukan Prioritas
8	Transportasi dan Pergudangan	5863899,4 Tertinggi ke 4	BASIS	PROGRESIF	Sektor Unggulan	Sektor Prioritas
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1477072,2 Tertinggi ke 7	NON- BASIS	PROGRESIF	Sektor Berkembang	Sektor Bukan Prioritas
10	Informasi dan Komunikasi	1354333 Tertinggi ke 8	NON- BASIS	PROGRESIF	Sektor Berkembang	Sektor Bukan Prioritas

NO	SEKTOR	Investasi (juta)	LQ	SHIFT SHARE	TIPOLOGI KLASEN	HASIL WAWANCARA
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	60806,2 Tertinggi ke 16	NON-BASIS	MUNDUR	Sektor Terbelakang	Sektor Bukan Prioritas
12	Real Estat	4869642,6 Tertinggi ke 5	NON-BASIS	PROGRESIF	Sektor Berkembang	Sektor Prioritas
13	Jasa Perusahaan	399669,8 Tertinggi ke 10	NON-BASIS	PROGRESIF	Sektor Berkembang	Sektor Bukan Prioritas
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	116783,6 Tertinggi ke 14	NON-BASIS	PROGRESIF	Sektor Berkembang	Sektor Bukan Prioritas
15	Jasa Pendidikan	37649,54 Tertinggi ke 17	NON-BASIS	PROGRESIF	Sektor Berkembang	Sektor Bukan Prioritas
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2228236,4 Tertinggi ke 6	BASIS	MUNDUR	Sektor Potensial	Sektor Bukan Prioritas
17	Jasa Lainnya	166824,4 Tertinggi ke 13	NON-BASIS	MUNDUR	Sektor Terbelakang	Sektor Prioritas

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, dari 17 sektor yang dianalisis, hanya sektor Transportasi dan Perdagangan yang secara konsisten memenuhi ketiga kriteria unggulan sekaligus, yaitu berstatus basis ($LQ > 1$), memiliki arah pergeseran progresif (*shift share* positif), dan tergolong sektor unggulan pada *tipologi klassen*, dengan nilai investasi mencapai Rp5.863.899,4 juta (tertinggi ke-4). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya besar secara nilai investasi, tetapi juga efisien dan berdaya saing tinggi, sehingga layak menjadi prioritas utama arahan investasi progresif.

Keempat alat analisis pada sub-bab sebelumnya, rata-rata nilai ICOR Jawa Tengah selama sepuluh tahun terakhir (2015-2024) tercatat sebesar 0,73, yang masih tergolong kategori efisien namun (di bawah ambang batas 4), namun perlu untuk ditingkatkan. Capaian

efisiensi tersebut tidak terlepas dari kinerja tiga sektor yang teridentifikasi sebagai sektor investasi progresif sesuai dengan pengertian investasi progresif sebelumnya, yaitu Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pemilihan ketiga sektor ini tidak didasarkan pada satu indikator tunggal, melainkan hasil analisis silang antara status kebasisan wilayah (LQ), arah daya saing (*shift-share*), besaran realisasi investasi, dan posisi kuadran *tipologi klassen*, sehingga arahan yang dihasilkan lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara analitis. Ketiga sektor tersebut, meskipun sama-sama diarahkan sebagai investasi progresif, sesungguhnya berangkat dari kondisi struktural yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan berikut.

Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan satu-satunya sektor yang menempati Kuadran I Tipologi Klassen, atau tergolong Sektor Unggulan, karena secara simultan memenuhi dua syarat utama: bernilai basis ($LQ > 1$) sekaligus berdaya saing progresif ($shift-share > 0$). Kombinasi ini menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi, dan didukung realisasi investasi yang tergolong tinggi yaitu 5.863,9 miliar rupiah atau peringkat ke-4 dari 17 sektor. Justifikasi investasi progresif pada sektor ini bersifat memperkuat keunggulan yang sudah terbentuk, sehingga menjadi prioritas dengan risiko kegagalan investasi yang relatif rendah dibandingkan sektor lain yang belum berstatus basis.

Sektor ini merupakan sektor dengan realisasi investasi tertinggi di antara seluruh 17 sektor ekonomi Jawa Tengah, yakni mencapai 27.186,02 miliar rupiah, serta secara konsisten bernilai basis ($LQ > 1$) yang menegaskan posisinya sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Akan tetapi, hasil analisis *shift-share* justru menunjukkan status mundur, sehingga dalam *tipologi klassen* sektor ini dikategorikan sebagai sektor potensial, bukan sektor unggulan seperti transportasi dan pergudangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kontribusi terhadap perekonomian tetap dominan, laju pertumbuhan Industri Pengolahan di Jawa Tengah belum mampu mengungguli rata-rata pertumbuhan sektor sejenis di tingkat nasional. Sektor yang memiliki nilai investasi tinggi belum tentu memiliki daya saing tinggi, karena investasi menunjukkan besarnya modal yang masuk, sedangkan *shift share* menilai kinerja pertumbuhan sektor tersebut dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah penelitian. Hal ini sejalan dengan komponen keunggulan kompetitif *shift-share* yang menunjukkan apakah suatu sektor di daerah mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian nasional. Jika pertumbuhan

sektor di daerah lebih lambat daripada sektor yang sama di tingkat provinsi atau nasional, maka komponen daya saingnya akan bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa sektor tersebut relatif kurang kompetitif dibandingkan sektor sejenis di wilayah penelitian (Nur & Rakhman, 2019). Sektor ini menjadi pilihan meskipun bernilai mundur karena diperkuat dengan hasil wawancara dengan DPMPTSP dimana sektor ini menjadi sektor prioritas. Dengan demikian, justifikasi investasi progresif pada sektor ini tidak didasarkan pada kondisi daya saingnya saat ini, melainkan pada bobotnya yang berpengaruh terhadap ICOR provinsi secara keseluruhan mengingat kontribusi investasinya yang sangat besar, perbaikan nilai sekecil apa pun pada sektor ini berpotensi memberikan efek pengganda yang besar terhadap penurunan ICOR Jawa Tengah secara agregat dan juga kondisi eksisting berdasarkan hasil wawancara. Investasi pada sektor ini diarahkan bukan untuk mempertahankan kondisi saat ini, melainkan untuk mendorong Industri Pengolahan naik kelas dari sektor potensial menjadi sektor unggulan.

Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor justru berada pada kondisi yang berlawanan. Meskipun berstatus non-basis ($LQ < 1$), sektor ini menunjukkan nilai shift-share yang progresif dan menempati peringkat investasi tertinggi kedua di Jawa Tengah dengan realisasi mencapai 12.327,5 miliar rupiah. Kombinasi non-basis namun berdaya saing tinggi ini menempatkan sektor perdagangan besar dan eceran pada kuadran sektor berkembang dalam *tipologi klassen*. Sektor berkembang memiliki daya saing yang sudah terbentuk namun kontribusinya terhadap perekonomian daerah belum optimal, sehingga sektor semacam ini justru paling berpeluang ditingkatkan menjadi sektor unggulan baru apabila memperoleh dukungan investasi yang konsisten (Wahyu et al., 2025). Besarnya realisasi investasi yang telah terjadi pada sektor ini menjadi indikasi bahwa arah investasi sejauh ini sudah tepat sasaran, sehingga tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhannya agar nilai LQ sektor ini turut meningkat mencapai angka satu, sejalan dengan daya saingnya yang sudah progresif.

Secara keseluruhan, ketiga sektor tersebut merepresentasikan tiga arah kebijakan investasi progresif yang saling melengkapi: transportasi dan pergudangan sebagai sektor unggulan yang perlu terus diperkuat agar keunggulannya tidak mengalami perubahan, perdagangan besar dan eceran sebagai sektor berkembang yang perlu digenjot agar naik kelas menjadi sektor unggulan baru, serta industri pengolahan sebagai sektor berskala besar namun melambat daya saingnya sehingga perlu direvitalisasi. Ketiga arah investasi ini secara

bersama-sama diproyeksikan mampu menjaga nilai ICOR Jawa Tengah tetap berada pada kategori efisien pada periode-periode mendatang.

4.7 Investasi Progresif

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal, baik yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Konteks perekonomian nasional, investasi memiliki peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Safitri et al., 2025). Investasi salah satu variabel yang sangat penting dan vital dalam kegiatan perekonomian setiap negara, guna menciptakan nilai tambah (*Value added*) melalui kegiatan produksi yang menghasilkan output barang dan jasa (Yamani, 2022). Sementara itu, progresif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai (ke arah) kemajuan atau perbaikan. Mengintegrasikan kedua konsep tersebut bersama hasil analisis nilai investasi, *location quotient* (LQ), dan *tipologi klassen*, dimana istilah investasi progresif sebagai pendekatan penanaman modal yang diarahkan secara bertahap pada sektor atau wilayah yang memiliki potensi tumbuh tinggi, daya saing kuat, dan efek pengganda besar bagi perekonomian daerah. Sehingga, berdasarkan hasil analisis sektor tersebut sesuai dengan definisi yang dimaksud sebagai investasi yang berprogresif sektor ini berada pada 3 sektor yang dinilai termasuk pada investasi progresif yaitu sektor transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, dan juga perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil, yang tersebar beberapa daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penetapan lokasi ini didapatkan berdasarkan hasil perhitungan LQ dan *shift-share* di setiap Kabupaten/Kota Jawa Tengah yang bernilai basis dan berdaya saing terhadap sektor investasi progresif dan tertera pada lampiran 3 dan lampiran 4.

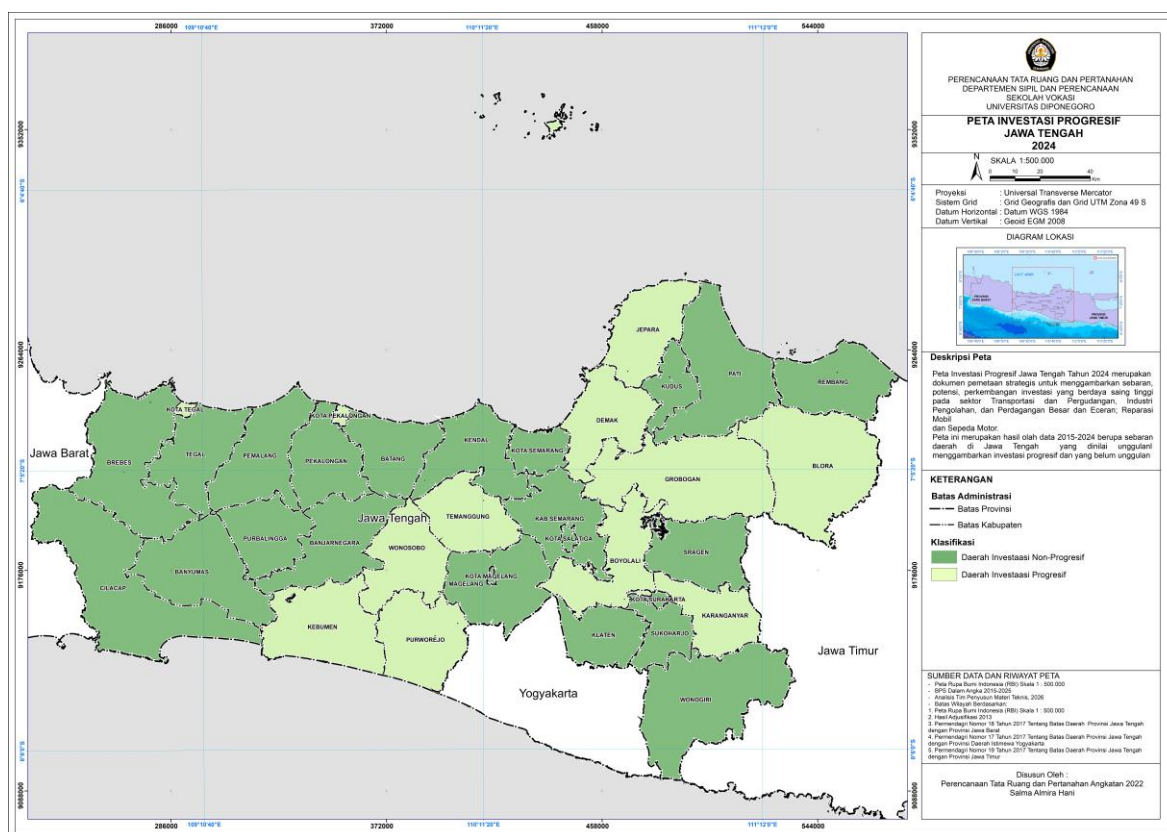
Tabel 4.7 Sebaran Sektor Investasi Progresif

No.	Sektor Investasi Progresif	Daerah Sebaran
1	Transportasi dan Pergudangan	Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Grobogan, Jepara, Temanggung, Kota Pekalongan, Kota Tegal

2.	Industri Pengolahan	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Demak
3.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Kabupaten Blora

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Peta investasi progresif beserta sebarannya sebagai berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 4.7.1 Peta Investasi Progresif di Jawa Tengah 2024

Hasil klasifikasi investasi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tiga sektor prioritas yang sama yaitu transportasi dan perdagangan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran/reparasi mobil dan sepeda motor berbasis olahan data 2015-2024. Setiap daerah dikategorikan: investasi progresif (hijau muda) atau non-progresif (hijau tua).

Dari 35 kabupaten/kota, hanya 12 daerah (34%) yang masuk kategori Investasi Progresif, sementara 23 daerah (66%) masih termasuk Investasi Non-Progresif. Artinya,

secara spasial, capaian investasi progresif di tiga sektor ini belum merata baru sepertiga wilayah Jawa Tengah yang menunjukkan performa unggul.

Daerah dengan investasi progresif: Jepara, Demak, Grobogan, Blora, Kota Pekalongan, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Kota Surakarta, dan Karanganyar. Daerah Investasi *Non-Progresif* meliputi sisa 23 kabupaten/kota lainnya, termasuk seluruh area barat (Brebes–Tegal–Pemalang–Pekalongan–Batang–Kendal), dan koridor Barlingmascakeb (Cilacap–Banyumas–Purbalingga–Banjarnegara–Kebumen di luar Kebumen sendiri), dan klaster tenggara (Klaten–Sukoharjo–Wonogiri–Sragen). Terdapat fenomena konvergensi berdasarkan teori Neoklasik ketika investasi pada daerah berkembang lebih besar dari tingkat depresiasinya, daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan terus-menerus sehingga kesenjangan pendapatan regional diprediksikan semakin mengecil dengan adanya proses mengejar ketertinggalan dari daerah miskin. Ini prinsip "*diminishing returns to capital*" daerah dengan basis modal/investasi yang sudah besar (Semarang, Kudus, Kendal) secara matematis lebih sulit mencatat pertumbuhan persentase tinggi dibanding daerah dengan basis kecil (Fahmi, 2020).

4.8 Analisis Program Kerja

Matriks RACI alat analisis berupa tabel yang digunakan untuk memetakan setiap kegiatan, target, maupun keputusan strategis dalam suatu proyek dengan cara mendefinisikan pihak-pihak yang mengemban tanggung jawab pelaksanaan, memiliki kewenangan pengambilan keputusan, perlu dilibatkan dalam proses konsultasi, serta perlu mendapatkan informasi terkait perkembangan kegiatan. Dalam konteks penelitian ini, matriks RACI diaplikasikan untuk memetakan peran dan tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan rencana yang sesuai dengan Renstra DPMPTSP.

Matriks RACI terdiri atas empat komponen utama sebagai berikut:

1. *Responsible* (Pelaksana)

Responsible merupakan pihak yang secara langsung menjalankan suatu kegiatan atau tugas tertentu. Pihak ini bertanggung jawab atas kelancaran proses pelaksanaan dan dituntut untuk memastikan bahwa tugas tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam satu kegiatan, dimungkinkan terdapat lebih dari satu pihak yang berperan sebagai *Responsible*, bergantung pada tingkat kompleksitas pekerjaan yang diemban.

2. *Accountable* (Penanggung Jawab Utama)

Accountable adalah pihak yang memiliki otoritas tertinggi dan menjadi penanggung jawab akhir atas suatu kegiatan. Pihak ini bertugas memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan sebagaimana mestinya dan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. *Consulted* (Pemberi Masukan)

Consulted adalah pihak yang dilibatkan untuk memberikan pertimbangan, masukan, maupun rekomendasi sebelum suatu keputusan ditetapkan atau kegiatan dilaksanakan. Hubungan komunikasi antara pihak *Responsible/Accountable* dengan *Consulted* bersifat dua arah karena melibatkan proses diskusi dan tukar pendapat secara aktif. Pihak *Consulted* umumnya memiliki keahlian khusus atau kepentingan tertentu yang relevan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

4. *Informed* (Penerima Informasi)

Informed adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan maupun proses pengambilan keputusan, namun tetap perlu mendapatkan informasi mengenai perkembangan maupun hasil dari suatu kegiatan. Arus komunikasi kepada pihak *Informed* bersifat satu arah, dengan tujuan menjaga transparansi serta memastikan seluruh pemangku kepentingan senantiasa mengetahui status kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan.

Berdasarkan keempat komponen tersebut, matriks RACI selanjutnya disusun sebagai instrumen implementasi yang menuangkan pembagian peran secara sistematis pada setiap tahapan kegiatan sebagaimana terlampir dalam lempiran table dibawah ini. Pemetaan ini bertujuan untuk memperjelas alur tanggung jawab antar pihak sekaligus mendukung efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi.

Tabel 4.8 RACI Berdasarkan Renstra DPMPTSP Jawa Tengah 2024

No.	Program Utama	Bertanggung Jawab (R)	Bertanggung Jawab Utama (A)	Dikonsultasikan (C)	Diberitahu (I)	Justifikasi
a.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data PM					
a.	Peningkatan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu aplikasi SIAP Jateng <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Data Informasi <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Unit Kerja Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, Dinsos <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Investor, Publik, DPMPTSP Kabupaten/Kota <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_KET</i>	1. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Data Informasi sebagai <i>responsible</i> dalam pengembangan teknis dan pemeliharaan sistem aplikasi. 2. Kepala DPMPTSP sebagai <i>accountable</i> karena peningkatan pemanfaatan sistem informasi merupakan termausk dalam program kerja Renstra. 3. Unit Kerja Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan sebagai validasi pelayanan. Kemudian OPD terkiat sebagai pemberi rekomendasi. 4. Investor, Publik, DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagai pengguna sistem yang memanfaatkan layanan digital DPMPTSP.

No.	Program Utama	Bertanggung Jawab (R)	Bertanggung Jawab Utama (A)	Dikonsultasikan (C)	Diberitahu (I)	Justifikasi
b.	Peningkatan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu aplikasi CJIP dan Buhansip <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Data Informasi <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_02_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Unit Kerja Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan, BAPPEDA <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_02_HUB</i>	Investor, Publik, DPMPTSP Kabupaten/Kota <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_02_KET</i>	1. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Data Informasi sebagai responsible dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi CJIP dan Buhansip. 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable karena pemanfaatan CJIP dan Buhansip merupakan bagian dari capaian kinerja digitalisasi investasi dalam Renstra. 3. Unit Kerja Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan memberi masukan teknis pelayanan, sedangkan BAPPEDA sebagai pemberi rekomendasi terkait keselarasan data potensi investasi dengan perencanaan pembangunan daerah. 4. Investor, Publik, DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagai pengguna informasi yang memanfaatkan data investasi pada platform CJIP dan Buhansip.
c.	Pengelolaan dan publikasi data investasi yang terintegrasi pada skala tingkat Daerah Provinsi <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Data Informasi <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_03_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Unit Kerja Pelayanan Perizinan, Unit Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_03_HUB</i>	Investor, Publik, DPMPTSP Kabupaten/Kota <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_03_KET</i>	1. Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Data Informasi sebagai responsible dalam pemutakhiran dan validasi data investasi sebelum dipublikasikan. 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable karena keakuratan data investasi yang dipublikasikan menjadi tanggung jawab pimpinan

No.	Program Utama	Bertanggung Jawab (R)	Bertanggung Jawab Utama (A)	Dikonsultasikan (C)	Diberitahu (I)	Justifikasi
						instansi. 3. Unit Kerja Pelayanan Perizinan, Unit Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan sebagai pemberi masukan atas data pelayanan yang akan dipublikasikan. 4. Investor, Publik, DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagai pengguna akhir yang memanfaatkan data investasi terintegrasi untuk kebutuhan pengambilan keputusan maupun sinkronisasi program daerah.
b.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
	Penyusunan Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal					
a.	Penetapan kebijakan/insentif penanaman modal di daerah <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_04_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Unit Kerja Pelayanan Perizinan, Unit Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan, Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_04_HUB</i>	Investor,DPMPTSP Kabupaten/Kota <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_04_KET</i>	1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal sebagai responsible dalam menyusun rancangan kebijakan/insentif penanaman modal daerah. 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable karena penetapan kebijakan investasi daerah merupakan bagian dari target strategis Renstra DPMPTSP. 3. Unit Kerja Pelayanan Perizinan, Unit Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan memberi masukan implementatif, sedangkan BAPPENDA sebagai pemberi rekomendasi karena kebijakan insentif berkaitan dengan pendapatan daerah. 4. Investor

No.	Program Utama	Bertanggung Jawab (R)	Bertanggung Jawab Utama (A)	Dikonsultasikan (C)	Diberitahu (I)	Justifikasi
						dan DPMPTSP Kabupaten/Kota diberitahu sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan/insentif yang ditetapkan.
b.	Pembuatan peta potensi investasi / kajian IPRO berbasis kewilayahan <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_05_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	BAPPEDA Kabupaten/Kota, BAPPEDA Provinsi, Unit Kerja Pelayanan Perizinan <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_05_HUB</i>	Pemerintah Kabupaten/Kota <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_05_KET</i>	1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal sebagai responsible dalam menyusun peta potensi investasi dan kajian IPRO berbasis kewilayahan. 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable atas hasil kajian yang menjadi dasar promosi investasi daerah. 3. BAPPEDA Kabupaten/Kota dan BAPPEDA Provinsi sebagai pemberi rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/RPJMD, sedangkan Unit Kerja Pelayanan Perizinan memberi masukan aspek kemudahan perizinan. 4. Pemerintah Kabupaten/Kota diberitahu karena peta potensi investasi berdampak pada perencanaan pembangunan di wilayahnya.
c.	Program Promosi Penanaman Modal					
	Penyelenggaraan Promosi dan Kepeminatan Investasi					

No.	Program Utama	Bertanggung Jawab (R)	Bertanggung Jawab Utama (A)	Dikonsultasikan (C)	Diberitahu (I)	Justifikasi
a.	Fasilitasi kemitraan UMB (Usaha Menengah Besar)-UMK (Usaha Menengah Kecil) (matchmaking) <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_06_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Unit Kerja Pelayanan Perizinan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_06_HUB</i>	DPMPTSP Kabupaten/Kota, Mitra UMKM <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_06_KET</i>	1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal sebagai responsible dalam menyelenggarakan kegiatan fasilitasi kemitraan (matchmaking) UMB-UMK. 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable karena peningkatan kemitraan UMKM merupakan bagian dari capaian kinerja pemberdayaan investasi daerah. 3. Unit Kerja Pelayanan Perizinan memberi masukan teknis, sedangkan Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pemberi rekomendasi pembinaan sesuai kewenangan sektoralnya. 4. DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Mitra UMKM diberitahu sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kemitraan.
b.	Pengawasan kepeminatan PMA (Penanaman Modal Asing) <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_07_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	DPMPTSP Kabupaten/Kota Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_07_HUB</i>	Investor, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_07_KET</i>	1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal sebagai responsible dalam mengawal proses kepeminatan investor PMA hingga tahap realisasi. 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable karena capaian realisasi investasi PMA menjadi salah satu indikator kinerja utama daerah. 3. DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagai pemberi masukan kondisi

No.	Program Utama	Bertanggung Jawab (R)	Bertanggung Jawab Utama (A)	Dikonsultasikan (C)	Diberitahu (I)	Justifikasi
						lapangan di wilayah lokasi investasi. 4. Investor dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi diberitahu karena keduanya merupakan pihak yang berkepentingan langsung atas perkembangan kepedulian investasi asing.
c.	Pengawasan kepedulian PMDN(Penanaman Modal Dalam Negri) hingga realisasi investasi <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_08_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	DPMPTSP Kabupaten/Kota <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_08_HUB</i>	Investor, Pemerintah Daerah <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_08_KET</i>	1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal sebagai responsible dalam mengawal kepedulian investor PMDN sampai dengan realisasi investasi. 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable atas capaian target realisasi investasi PMDN dalam Renstra. 3. DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagai pemberi masukan kondisi dan potensi wilayah setempat. 4. Investor dan Pemerintah Daerah diberitahu karena realisasi investasi PMDN berdampak langsung pada perekonomian dan pembangunan di wilayah tersebut.
D.	Program Pelayanan Penanaman Modal					
	Pelayanan Perizinan Berusaha					
a.	Penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi (OSS RBA & SIAP Jateng) <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Unit Kerja Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan, Dinas Kelautan dan	Publik, Investor, DPMPTSP Kabupaten/Kota <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	1. Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan sebagai responsible dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terintegrasi melalui OSS RBA dan SIAP

No.	Program Utama	Bertanggung Jawab (R)	Bertanggung Jawab Utama (A)	Dikonsultasikan (C)	Diberitahu (I)	Justifikasi
		<i>dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>		Perikanan, Dinas Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, Dinsos <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	<i>dan wawancara PDM_01_01_KET</i>	Jateng. 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable karena kecepatan dan kualitas pelayanan perizinan merupakan indikator kinerja utama DPMPTSP. 3. OPD teknis terkait sebagai pemberi rekomendasi/verifikasi teknis sektoral sebelum penerbitan izin berbasis risiko. 4. Publik, Investor, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota diberitahu sebagai pengguna langsung layanan perizinan yang diselenggarakan.
b.	Penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_10_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_10_HUB</i>	Publik <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_10_KET</i>	1. Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan sebagai responsible dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan. 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable karena penanganan pengaduan merupakan bagian dari standar pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pimpinan instansi. 3. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal dikonsultasikan untuk menindaklanjuti akar masalah kebijakan yang mendasari pengaduan. 4. Publik diberitahu sebagai pihak pelapor sekaligus

No.	Program Utama	Bertanggung Jawab (R)	Bertanggung Jawab Utama (A)	Dikonsultasikan (C)	Diberitahu (I)	Justifikasi
						penerima manfaat atas tindak lanjut pengaduan.
c.	Inovasi layanan perizinan (Gerai Investasi, Sibayan Lemon, Lakon-e Pandu) <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_11_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_11_HUB</i>	Publik, Investor, DPMPTSP Kabupaten/Kota <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_11_KET</i>	1. Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan sebagai responsible dalam mengembangkan inovasi layanan perizinan (Gerai Investasi, Sibayan Lemon, Lakon-e Pandu). 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable karena inovasi pelayanan merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi tematik investasi yang menjadi target Renstra. 3. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal dikonsultasikan agar inovasi layanan selaras dengan arah kebijakan promosi investasi. 4. Publik, Investor, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota diberitahu sebagai pengguna langsung inovasi layanan yang dikembangkan.
E	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
	Pengawasan, Pengendalian, dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah PM					

No.	Program Utama	Bertanggung Jawab (R)	Bertanggung Jawab Utama (A)	Dikonsultasikan (C)	Diberitahu (I)	Justifikasi
a.	Pengawasan kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal (LKPM) <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Pengarahan, Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Informasi <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_12_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_12_HUB</i>	Investor, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan OPD terkait. <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_12_KET</i>	1. Bidang Pengarahan, Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Informasi sebagai responsible dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal melalui LKPM. 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable karena kepatuhan pelaporan LKPM investor menjadi bagian dari indikator pengendalian investasi daerah. 3. Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan serta Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal dikonsultasikan karena data LKPM berkaitan dengan riwayat perizinan dan kebijakan investasi investor. 4. Investor, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan OPD terkait diberitahu sebagai pihak yang berkepentingan atau terdampak atas hasil pengawasan.
b.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal eksisting <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026</i>	Bidang Pengarahan, Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Informasi <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_13_HUB</i>	Kepala DPMPTSP <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_01_HUB</i>	Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal	Investor <i>Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_13_KET</i>	1. Bidang Pengarahan, Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Informasi sebagai responsible dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang sudah berjalan (eksisting). 2. Kepala DPMPTSP sebagai accountable karena

No.	Program Utama	Bertanggung Jawab (R)	Bertanggung Jawab Utama (A)	Dikonsultasikan (C)	Diberitahu (I)	Justifikasi
				Sumber : Renstra DPMPTSP 2024-2026 dan wawancara PDM_01_13_HUB		penyelesaian hambatan investasi eksisting merupakan bagian dari fungsi pelayanan investasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan instansi. 3. Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan, dan Peningkatan Pelayanan serta Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal dikonsultasikan karena permasalahan investasi sering berkaitan dengan aspek perizinan maupun kebijakan. 4. Investor diberitahu sebagai pihak yang menerima manfaat langsung atas penyelesaian permasalahan investasinya.

Sumber: Renstra DPMPTSP Jawa Tengah 2015-2024

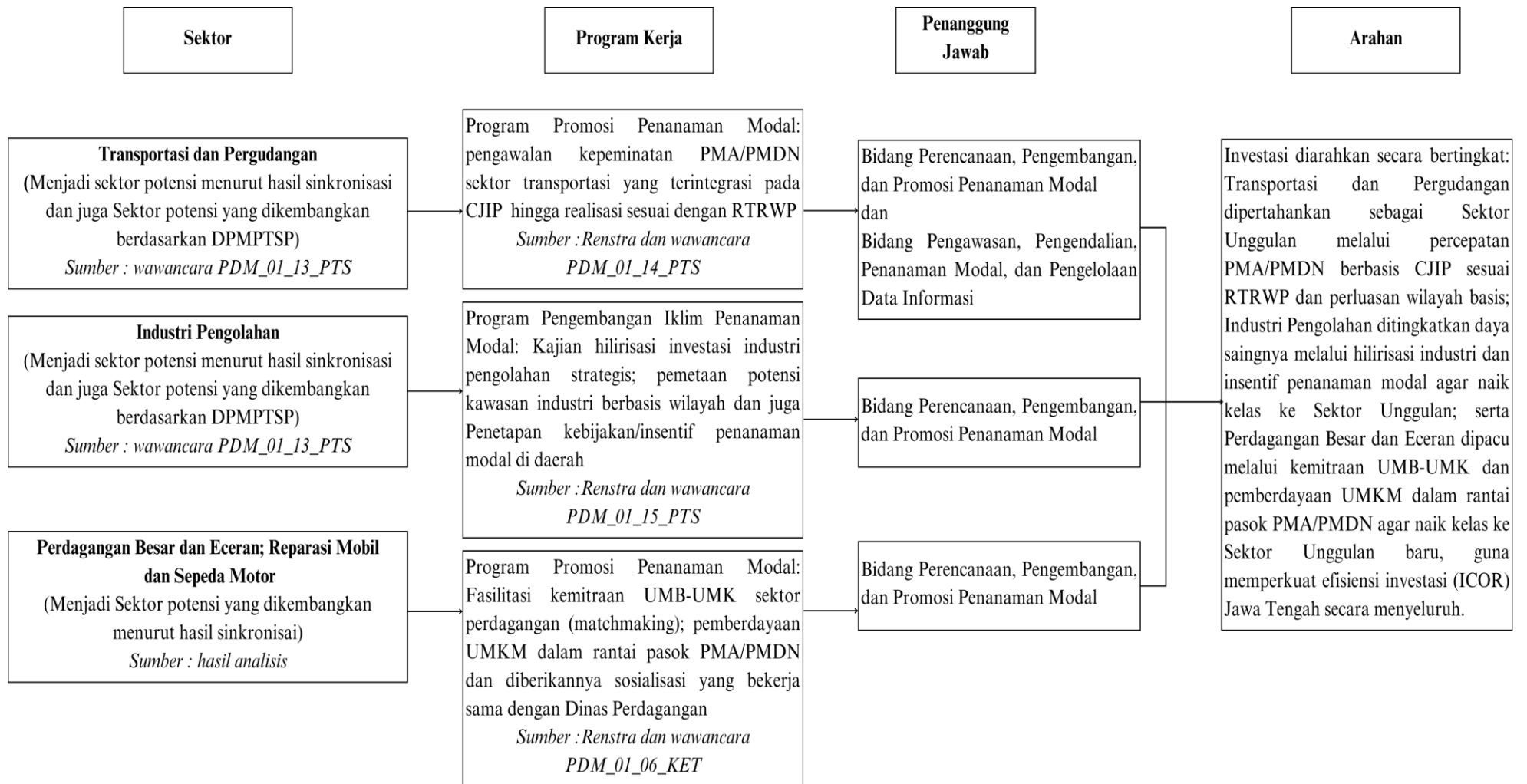
4.9 Arahan Investasi Progresif

Arahan investasi progresif yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan hasil sintesis dari beberapa pendekatan analisis yang saling melengkapi, yaitu analisis investasi, Location Quotient (LQ), analisis shift-share, analisis tipologi Klassen, serta analisis program kerja yang bersumber dari hasil wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, sementara analisis shift-share digunakan untuk melihat pergeseran struktur perekonomian serta daya saing masing-masing sektor dari waktu ke waktu. Analisis tipologi Klassen kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan sektor-sektor tersebut ke dalam empat kuadran, yaitu sektor unggulan, sektor berkembang, sektor potensial, dan sektor terbelakang, berdasarkan kombinasi laju pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah.

Selanjutnya, hasil klasifikasi tipologi Klassen tersebut dipadukan dengan program kerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, guna memastikan bahwa arahan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga selaras dengan kebijakan dan program yang telah dan akan dijalankan oleh pemerintah daerah. Integrasi antara hasil analisis kuantitatif (investasi, LQ, shift-share, dan tipologi Klassen) dengan hasil wawancara kualitatif terhadap pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menghasilkan arahan investasi yang lebih komprehensif, aplikatif, dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Melalui penggabungan keempat pendekatan tersebut, dihasilkan sebuah arahan investasi progresif yang disusun secara spesifik untuk masing-masing kelompok sektor sesuai posisinya dalam *tipologi klassen*. Arahan ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda pada setiap kelompok sektor mulai dari penguatan dan pemeliharaan pada sektor unggulan, percepatan pertumbuhan pada sektor berkembang, optimalisasi dan hilirisasi pada sektor potensial, hingga pemberian insentif dan dorongan pada sektor terbelakang sebagaimana disajikan secara rinci pada diagram berikut

Tabel 4.9 Arahan Investasi Progresif



Sumber: Hasil wawancara dan Dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara didapati 6 sektor yang berpotensi yang dalam pengembangan pihak DPMPTSP meliputi sektor Transportasi dan Pergudangan, Real Estat, Jasa Lainnya, Pengadaan Listrik dan Gas, Pertanian, Kehutanan, dan perikanan, dan juga Industri Pengolahan. Sektor tersebut juga tertera dalam website CJIP Jawa Tengah dengan menawarkan berbagai macam proyek investasi yang dapat dipilih oleh para investor. Terdapat temuan berupa kesamaan sektor yang sama dengan hasil sinkronisasi hasil analisis yang dilakukan yaitu pada sektor Transportasi dan Pergudangan dan juga industri pengolahan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa persepsi DPMPTSP terhadap potensi sektor tersebut sejalan dengan analisis yang telah dilakukan, sehingga sektor Transportasi dan Pergudangan dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan yang memiliki validitas baik secara kuantitatif melalui perhitungan statistik maupun secara kualitatif berdasarkan pengalaman dan pengamatan langsung pihak DPMPTSP di lapangan.

1. Transportasi dan Pergudangan

Sektor ini muncul sebagai sektor potensial dari hasil sinkronisasi sekaligus dari wawancara DPMPTSP. Program kerjanya berupa Program Promosi Penanaman Modal — mengawal minat investor PMA/PMDN di sektor transportasi yang terintegrasi dengan CJIP hingga realisasinya sesuai RTRWP. Penanggung jawabnya melibatkan dua bidang: Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal, serta Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penanaman Modal, dan Pengelolaan Data Informasi.

2. Industri Pengolahan

Sama seperti sektor pertama, sektor ini teridentifikasi dari hasil sinkronisasi dan wawancara pihak DPMPTSP. Program kerjanya adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mencakup kajian hilirisasi investasi industri strategis, pemetaan kawasan industri berbasis wilayah, dan penetapan kebijakan/insentif penanaman modal daerah. Penanggung jawabnya: Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal.

3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Berbeda dari dua sektor sebelumnya, sektor ini bersumber dari hasil analisis, dilihat dari tingginya investasi dan juga sektor yang dinilai berdaya saing. Program kerjanya berupa Program Promosi Penanaman Modal fasilitasi kemitraan UMB-UMK di sektor perdagangan (*matchmaking*) dan pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok PMA/PMDN. Penanggung jawabnya sama dengan sektor Industri Pengolahan.

4. Arahkan (kesimpulan terpadu)

Ketiga jalur di atas bermuara pada satu arahan investasi yang bersifat bertingkat:

- a. Transportasi dan Pergudangan dipertahankan sebagai Sektor Unggulan lewat percepatan PMA/PMDN berbasis CJIP dan perluasan wilayah basis;
- b. Industri Pengolahan didorong naik kelas menjadi Sektor Unggulan melalui hilirisasi industri dan insentif investasi;
- c. Perdagangan Besar dan Eceran didorong naik kelas menjadi Sektor Unggulan baru lewat kemitraan UMB-UMK dan pemberdayaan UMKM.

Tujuan akhir dari ketiga arahan ini adalah memperkuat efisiensi investasi (ICOR) Jawa Tengah secara menyeluruh — jadi strategi ini pada dasarnya bertingkat: pertahankan yang sudah unggul, dorong dua sektor lain naik kelas untuk memperluas basis sektor unggulan di daerah.